



RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Agam

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan taufik dan hidayahNya jualah, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku **Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Agam Tahun 2021-2026**.

Buku ini diharapkan dapat mengakomodir pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah berjalan dan menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam kedepannya hingga Tahun 2026, karena buku ini secara umum menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan secara indikator penilaian keberhasilan suatu program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang simultan dan berkesinambungan agar mampu mencapai visi, misi dan tujuan yang telah di tetapkan.

Demikianlah buku ini disusun agar dapat dipedomani, dipergunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Agam
Kepala,

ROSWA DESWIRA, S.Pi.M.Si
NIP. 19721209 200604 2 007



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-----------|
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar belakang. | 1 |
| 1.1.1. Keterkaitan Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam | 3 |
| 1.1.2. Keterkaitan Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI..... | 4 |
| 1.1.3. Keterkaitan Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat..... | 5 |
| 1.1.4. Keterkaitan Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam..... | 5 |
| 1.2 Landasan hukum | 6 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.3.1 Maksud..... | 8 |
| 1.3.2 Tujuan | 9 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD..... | 11 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan | 12 |
| 2.2 Sumber Daya SKPD..... | 24 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan | 29 |
| 2.3.1 Bidang Ketahanan Pangan | 32 |
| 2.3.2 Bidang Perikanan | 34 |
| 2.3.3 Indikator Kinerja dalam Aspek Pendanaan | 41 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan | 44 |



| | |
|--|-----------|
| BAB.III.PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS..... | 46 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan..... | 46 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 47 |
| 3.2.1 Visi | 47 |
| 3.2.2 Misi..... | 48 |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan..... | 51 |
| 3.4 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian..... | 54 |
| 3.5 Telaahan Rencana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat | 57 |
| 3.6 Telaahan Renstra Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat..... | 58 |
| 3.7 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 59 |
| BAB.IV.TUJUAN DAN SASARAN | 63 |
| BAB.V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... | 66 |
| BAB.VI.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF..... | 71 |
| BAB.VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 73 |
| Bab. VIII.PENUTUP | 75 |
| LAMPIRAN | |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memprioritaskan peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan tersebut, maka kebijakan umum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi panganpokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizimasyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatankesejahteraan pelaku usaha pangan.

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa pembangunan perikanan dilaksanakan bertujuan untuk; 1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; 2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara; 3) mendorong perluasan dan kesempatan kerja; 4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi protein ikan; 5) mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan; 6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing ikan; 7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; 8) mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidaya ikan, dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal; dan 9) menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan



pembudidaya ikan dan tata ruang.

Dalam memenuhi tanggungjawabnya pemerintah melalui undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan termasuk pembangunan kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan. Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, salah satu rencana pembangunan adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun. Renstra Perangkat Daerah tersebut disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Merujuk pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 80 Tahun 2022, menyelenggarakan 2 urusan konkuren pemerintah kabupaten yaitu urusan pangan yang merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan kelautan dan perikanan yang merupakan urusan pilihan.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, merupakan penjabaran dari visi, misi, program dan kegiatan serta faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 dan bertujuan



untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam periode ketiga (Tahun 2021-2026).

Proses penyusunan Renstra Dinas diawali dengan pembentukan tim penyusun, penyusunan agenda kerja tim, pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kemudian dilanjutkan dengan perumusan dan penyajian rancangan Renstra PD. Perumusan dan penyajian rancangan Renstra PD berpedoman kepada hasil pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD, review Renstra kementerian dan Renstra PD propinsi, penelaahan RTRW Kabupaten Agam serta analisis KLHS. Penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD dilakukan setelah diverifikasi oleh tim di Bappeda guna mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Bentuk hubungan (keterkaitan) antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1.1.1 Keterkaitan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam menyiapkan rancangan awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Agam;
- b. Rancangan Awal Renstra PD Kabupaten Agam termasuk Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam menjadi input bagi Bappeda Kabupaten Agam untuk memutakhirkan rancangan RPJMD Kabupaten Agam;
- c. Rancangan RPJMD Kabupaten Agam dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah



Kabupaten Agam;

- d. Hasil Musrenbang Jangka Menengah Kabupaten Agam digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Agam;
- e. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Agam digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi OPD Kabupaten Agam dalam pemutakhiran Rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir Renstra PD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam;
- f. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Agam ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Agam maka selanjutnya Bupati Agam menetapkan Rancangan Akhir Renstra PD menjadi Renstra PD melalui Keputusan Bupati Agam.
- g. Selanjutnya Renstra PD menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja PD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

1.1.2 Keterkaitan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Renstra Badan Pangan Nasional dengan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam menyiapkan rancangan awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan melakukan telaahan terhadap Renstra Badan Pangan Nasional serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;

- a. Renstra Badan Pangan Nasional serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menjadi input bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam untuk memutakhirkan rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam;
- b. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2021–2026 menindaklanjuti sasaran program dan kebijakan pusat



yang tertuang dalam Renstra Badan Pangan Nasional serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditargetkan untuk masing-masing daerah.

1.1.3 Keterkaitan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Renstra Dinas Pangan serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam menyiapkan rancangan awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan melakukan telaahan terhadap Renstra Dinas Pangan serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat;
- b. Renstra Dinas Pangan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat menjadi input bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam untuk memutakhirkan rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam.
- c. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam bersinergi dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pangan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat dalam mencapai sasaran yang sama.

1.1.4 Keterkaitan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam.

- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam menyiapkan rancangan awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Agam;



- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam sesuai tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Agam dan mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam melalui Forum OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam;
- c. Rancangan Awal Renja PD Kabupaten Agam termasuk Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam menjadi input bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Agam menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Agam;
- d. Hasil Musrenbang Kabupaten Agam digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Agam;
- e. Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Agam digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi OPD Kabupaten Agam dalam pemutakhiran Rancangan Renja PD menjadi Rancangan Akhir Renja PD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam;
- f. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Agam ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Agam maka OPD Kabupaten Agam menetapkan Rancangan Akhir Renja PD menjadi Renja PD, dimana Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah;



2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2021–2026 adalah :

1. Sebagai Pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Ketahanan Pangan serta Ketahanan Pangan selama lima tahun kedepan;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dalam perencanaan jangka menengah;
3. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Pangan serta Kelautan dan Perikanan yang transparan dan akuntabel.
4. Sebagai dasar atau acuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam untuk menjalankan program dan kegiatan kurun



waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan bidang kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RenstraPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut;

- Bab I : Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Pada latar belakang dijabarkan keterkaitan Renstra DKPP dengan RPJMD, Renstra KKP RI dan Renstra Badan Pangan Nasional RI, Renstra DKP dan Renstra Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat serta Renja DKPP Kabupaten Agam.
- Bab II : Menjelaskan tentang gambaran pelayanan OPD yang ditinjau dari tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, Sumber daya OPD dan kinerja pelayanan OPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.
- Bab III : Menjelaskan tentang permasalahan dan isu-isu strategis OPD yang memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah



dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV : Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran OPD.

Bab V : Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis SWOT.

Bab VI : Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang dilengkapi dengan matriks pada lampiran.

Bab VII : Menjelaskan tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Bab VIII : Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (6), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) disusun sesuai tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi OPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan OPD pada akhir periode Renstra OPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 disebut dengan Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 disebutkan bahwa Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Menindaklanjuti Undang-Undang 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Agam melakukan penyesuaian Struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tersebut, urusan kelautan dan perikanan yang sebelumnya diselenggarakan oleh Dinas



Kelautan dan Perikanan serta urusan pangan yang sebelumnya diselenggarakan oleh Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, disatukan penyelenggaraannya dalam satu Perangkat Daerah baru yaitu Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2022.

Gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam merupakan gambaran hasil penyelenggaraan upaya pembangunan dan pengelolaan ketahanan pangan serta kelautan dan perikanan yang tidak terlepas dari amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan penyelenggaraan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dari tahun 2021-2026 yang menjadi dasar dalam perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, dapat ditinjau dari keberhasilan penyelenggaraan upaya pembangunan dan pengelolaan ketahanan pangan serta kelautan dan perikanan periode sebelumnya sebagai suatu sistem yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk urusan kelautan dan perikanan serta Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan untuk urusan pangan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Strukur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Agam Nomor 80 Tahun 2022 tentang pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah dibidang pangan dan



perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok

Tugas yang diemban Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan, kelautan dan perikanan.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pangan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi SKPD

a. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dibantu oleh:

- a) Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana
- b) Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
- c) Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
- d) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



- e) Bidang Perikanan Budi Daya dan Perikanan Tangkap
- f) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- g) UPTD

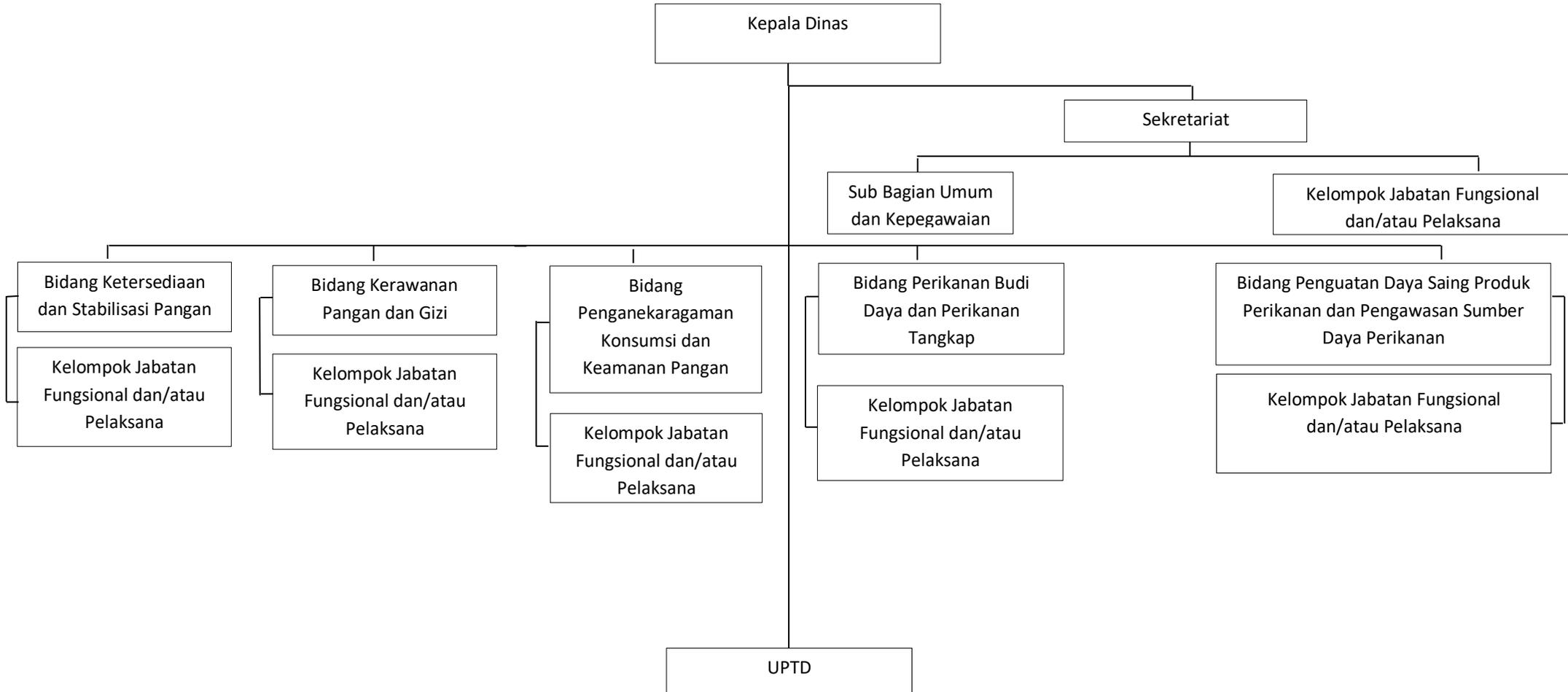
b. Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan , dapat dilihat pada halaman berikut.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN AGAM

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah)



c. Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang.

1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Uraian tugas:

memimpin dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan dan bidang perikanan.

2) Sekretariat

Uraian tugas:

Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan pelaporan.

Fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b) Perumusan kebijakan teknis dan pengordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- c) Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja dinas;
- d) Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran dinas;
- e) Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- f) Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup dinas;
- g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;



- i) Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi, dan laporan pertanggungjawaban;
- j) Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan dinas;
- k) Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris dibantu oleh Subbagian umum dan kepegawaian.

3) Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Uraian tugas:

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan.

Fungsi:

- a) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan;
- b) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan;
- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan;
- d) pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan;
- e) penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan;



- f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan;
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Uraian tugas:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang kerawanan pangan dan gizi serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.

Fungsi:

- a) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kerawanan pangan dan gizi serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- b) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kerawanan pangan dan gizi serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- d) pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kerawanan pangan dan gizi serta



pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;

e) penyiapan pemantapan program di bidang kerawanan pangan dan gizi serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;

f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan dan gizi serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; dan

g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Uraian tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian perdampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan.

Fungsi ;

a) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

b) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;



- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d) pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e) penyiapan pemantapan program di bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Perikanan Budi Daya dan Perikanan Tangkap

Uraian tugas;

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan budi daya dan perikanan tangkap, penyediaan sarana prasarana, pengembangan kawasan budi daya, perizinan dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan kecil, sarana prasarana, pengelolaan penangkapan ikan, fasilitasi tanda daftar usaha, pengelolaan tempat pelelangan ikan.

Fungsi;

- a) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang perikanan budi daya dan perikanan tangkap, penyediaan sarana prasarana, pengembangan kawasan budi daya, perizinan dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan



- perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan kecil, sarana prasarana, pengelolaan penangkapan ikan, fasilitasi tanda daftar usaha, pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- b) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang perikanan budi daya dan perikanan tangkap, penyediaan sarana prasarana, pengembangan kawasan budi daya, perizinan dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan kecil, sarana prasarana, pengelolaan penangkapan ikan, fasilitasi tanda daftar usaha, pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budi daya dan perikanan tangkap, penyediaan sarana prasarana, pengembangan kawasan budi daya, perizinan dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan kecil, sarana prasarana, pengelolaan penangkapan ikan, fasilitasi tanda daftar usaha, pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- d) pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budi daya dan perikanan tangkap, penyediaan sarana prasarana, pengembangan kawasan budi daya, perizinan dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan kecil, sarana prasarana, pengelolaan penangkapan ikan, fasilitasi tanda daftar usaha, pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- e) penyiapan pemantapan program di bidang perikanan budi daya dan perikanan tangkap,



penyediaan sarana prasarana, pengembangan kawasan budi daya, perizinan dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan kecil, sarana prasarana, pengelolaan penangkapan ikan, fasilitasi tanda daftar usaha, pengelolaan tempat pelelangan ikan;

- f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan budi daya dan perikanan tangkap, penyediaan sarana prasarana, pengembangan kawasan budi daya, perizinan dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan kecil, sarana prasarana, pengelolaan penangkapan ikan, fasilitasi tanda daftar usaha, pengelolaan tempat pelelangan ikan; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;

Uraian tugas;

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penguatan daya saing produk perikanan termasuk di dalamnya bina mutu produk perikanan, penyediaan dan penyaluran bahan baku perikanan, diversifikasi olahan, sarana prasarana, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan.

Fungsi;



- a) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang penguatan daya saing produk perikanan termasuk di dalamnya bina mutu produk perikanan, penyediaan dan penyaluran bahan baku perikanan, diversifikasi olahan, sarana prasarana, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- b) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang penguatan daya saing produk perikanan termasuk di dalamnya bina mutu produk perikanan, penyediaan dan penyaluran bahan baku perikanan, diversifikasi olahan, sarana prasarana, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk perikanan termasuk di dalamnya bina mutu produk perikanan, penyediaan dan penyaluran bahan baku perikanan, diversifikasi olahan, sarana prasarana, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- d) pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang penguatan daya saing produk perikanan termasuk di dalamnya bina mutu produk perikanan, penyediaan dan penyaluran bahan baku perikanan, diversifikasi olahan, sarana prasarana, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan;



- e) penyiapan pemantapan program di bidang penguatan daya saing produk perikanan termasuk di dalamnya bina mutu produk perikanan, penyediaan dan penyaluran bahan baku perikanan, diversifikasi olahan, sarana prasarana, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan.
- f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penguatan daya saing produk perikanan termasuk di dalamnya bina mutu produk perikanan, penyediaan dan penyaluran bahan baku perikanan, diversifikasi olahan, sarana prasarana, pemberdayaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan.
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) UPTD

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dapat dibentuk UPTD pada dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas;
melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

2.2. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia



Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai peran penting dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Agam.

Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, bila dilihat dari kebutuhan dan beban tugas yang ada, maka secara kualitas maupun kuantitas masih sangat kurang. Sebagai dinas teknis yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan sektor Ketahanan Pangan dan Perikanan sangat membutuhkan penambahan SDM dengan basis kelautan dan perikanan, mengingat potensi sumber daya alam (SDA) bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Agam sangat besar dan beragam, yang terdiri dari: danau, sungai, muara/estuarin, pesisir, lautan serta 2 (dua) pulau kecil yaitu pulau ujung dan pulau tengah.

Kurangnya SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dari segi Kuantitas terlihat dari Jumlah Tenaga yang dimilikinya serta belum memiliki tenaga fungsional teknis selain Fungsional Penyuluh Perikanan.

Status kepegawaian dan strata pendidikan pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam berjumlah 59 orang yang terdiri dari 30 orang PNS, 4 orang PTT/Kontrak, Penyuluh Kontrak Kementerian 5 orang dan 20 orang Tenaga Sukarela yang tersebar di kantor dinas kabupaten maupun Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Benih Ikan dan Posikandu.

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam Tahun 2020



| No. | Uraian | Ess II | Ess III | Ess IV | Fungsional | Staf | PTT/Kontrakt/THL/PBB Pusat | Jumlah |
|-----|---|----------|----------|-----------|------------|----------|----------------------------|-----------|
| 1. | Kepala Dinas | 1 | | | | | | 1 |
| 2. | Sekretariat | | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 3. | Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan | | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 4. | Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi | | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5. | Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | | 1 | 2 | 11 | 0 | 7 | 21 |
| 6. | Bidang Perikanan Budi Daya dan Perikanan Tangkap | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 7. | Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan | | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8. | UPT BBI Palembang | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9. | UPT BBI Lubuk Basung | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | Total | 1 | 5 | 12 | 11 | 2 | 24 | 55 |

(Sumber Data: Bagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, 2021).

2. Sarana dan prasarana yang dimiliki

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam saat ini yaitu 2 unit Balai Benih Ikan yang terletak di Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Palembang dan 1 unit Pos Pelayan Terpadu. Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Benih Ikan dikepalai oleh seorang eselon IVa yang dibantu oleh seorang sekretaris (esselon IV.b) dan 2 orang Pegawai Tidak Tetap dan 3 orang Tenaga Sukarela sebagai pembantu pelaksana teknis di lapangan.

a. Balai Benih Ikan (BBI) Lubuk Basung

BBI Lubuk basung berdiri di areal seluas 5.523 m² di Kecamatan Lubuk Basung dengan sarana prasarana yang dimiliki sebagai berikut:



Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana BBI Lubuk Basung

| No | Jenis Sarana Prasarana | | Jenis/ukuran | Jumlah |
|----|------------------------|---|---|---|
| 1 | Kolam | - Induk - Pendederan - Pembenihan/pemijahan - Pakan alami | 8 x 10 m ² 14 x 20 m ² 5 x 3 m ² 2,5 x 1 m ² | 4 petak 8 petak 3 petak 8 petak |
| 2 | Induk/bibit ikan | - Nila - Mas - Lele - Koi - Gurame | Best, gesit, nirwana Majalaya Sangkuriang, dumbo | 400 ekor 50 ekor 40 ekor 140 ekor 27 ekor 160 ekor |
| 3 | Gedung | - Kantor - Rumah jaga/Pos - Hatchery | 4 x 6 m ² 9 x 8 m ² 18 x 23 m ² | 1 unit 1 unit 1 unit |
| 4 | Prasarana Pendukung | - Genset - Alat ukur kualitas air - Mesin Potong rumput - Mesin Bajak - Blower - Becak Motor | 6 PK - - 3 PK 1 PK Roda 3 | 1 unit 1 paket 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit |

Berdasarkan luas lahan yang ada, total kapasitas produksi optimal BBI Lubuk Basung 1.000.000 ekor benih pertahun. Jumlah tersebut telah berhasil dicapai pada tahun 2015.

b. Balai Benih Ikan (BBI) Gumarang

BBI Gumarang berdiri di areal seluas 29.350 m² di Kecamatan Palembang dengan sarana prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 2.3. Sarana Prasarana BBI Gumarang

| No | Jenis Sarana Prasarana | | Jenis/ukuran | Jumlah |
|----|------------------------|-------------------------|--|------------------|
| 1 | Kolam | - Induk - Pendederan | 29 x 15 m ² 19,5 x 13,5 m ² | 4 unit 6 unit |



| | | | | |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| | | - Pembenihan/pemijahan | 29,9 x 16,5 m ² | 1 unit |
| | | - Pakan alami | 29,9 x 16,5 m ² | 1 unit |
| 2 | Induk/bibit ikan | - Nila | Best, gesit, nirwana | 1.550 ekor |
| | | - Lele | Dumbo | 60 ekor |
| | | - Patin | - | 40 ekor |
| 3 | Gedung | - Rumah jaga/Pos | 6 x 10 m ² | 1 unit |
| | | - Hatchery | 19 x 12 m ² | 1 unit |
| | | - Mess | 7 x 10 m ² | 1 unit |
| 4 | Prasarana Pendukung | - Genset | 6 pk | 1 unit |
| | | - Becak Motor | Roda 3 | 1 unit |

Pada saat ini BBI Gumarang belum bisa dioptimalkan karena terbatasnya sumber air yang ada terutama di musim kemarau. Untuk mengatasinya diusulkan dan dilaksanakan pembangunan sumur bor melalui dana DAK pada tahun anggaran 2015, namun hasilnya belum mampu untuk mengairi seluruh kolam yang ada.

Semenjak adanya perubahan struktur dan organisasi dinas tahun 2008, Balai Benih Ikan (BBI) di jadikan UPTD yang berada langsung dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga produksi benih ikan BBI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini didorong oleh adanya pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana yang ada pada BBI serta peningkatan profesionalitas pengelola BBI yang ditunjukkan dengan telah diperolehnya sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk BBI Lubuk Basung pada tahun 2013 dan BBI Gumarang pada tahun 2014 dari Direktorat Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun peningkatan produksi BBI ini tidak terlalu signifikan dan belum mencapai kapasitas optimal produksi BBI.

c. Pos Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)

Bangunan Pos Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU) seluas 63 m² berdiri di areal seluas 825 m² di Kecamatan



Tanjung Raya dengan sarana prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)

| NO | Nama Barang/Jenis Barang | Volume | Satuan | Ket |
|----|---|--------|--------|-----|
| 1 | Meja Kepala | 1 | Unit | |
| 2 | Kursi Kepala | 1 | Unit | |
| 3 | Lemari Arsip Ruang Kepala Posikandu | 1 | Unit | |
| 4 | Meja Kasir | 1 | Unit | |
| 5 | Meja Pelayanan Teknis | 1 | Unit | |
| 6 | Meja Administrasi | 1 | Unit | |
| 7 | Kursi Pelayanan | 8 | Unit | |
| 8 | Sofa Ruang Tunggu | 1 | Unit | |
| 9 | Lemari Penyimpanan Peralatan Labolatorium | 1 | Unit | |

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam mempunyai 2 unit BBI yang terletak di Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Palembayan dan 1 unit Pos Pelayan Terpadu. UPTD BBI dikepalai oleh seorang eselon IVa yang dibantu oleh seorang sekretaris (eselon IV.b) dan 5 orang tenaga sukarela sebagai pembantu pelaksana teknis di lapangan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam merupakan keberhasilan Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam pengelolaan sumberdaya Ketahanan Pangan dan Perikanan .

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD pada Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2022 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tidak terdapat Target SPM maupun Indikator Kinerja Kunci. Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan disajikan dalam indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2010 – 2015. Capaian dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2010 – 2015 disajikan sebagai berikut.



Tabel. 2.5 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Renstra

| No | Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----------|---|-------------|------------|-------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|----------|-----------|------------------------------|-------|-------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Bidang Ketahanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Regulasi ketahanan pangan | | | | ada | Ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | Ketersediaan pangan utama (%) | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 297 | 297 | 304 | 323 | 347 | 297 | 297 | 304 | 323 | 347 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Bidang Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kontribusi lap. Usaha perikanan terhadap PDRB | | | | 1,97 | 2,02 | 2,07 | 2,12 | 2,17 | 4,2 | 4,22 | 4,29 | 4,58 | 4,67 | 183,3 | 193,6 | 177,8 | 94,8 | 47,5 |
| 2 | Produksi perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Perikanan budidaya (ton) | | | | 89.376 | 94.223 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 85.463 | 48.455 | 46.198 | 45.653,7 | 25.589,39 | 96 | 51 | 84 | 91 | 51 |
| | - Perikanan tangkap (ton) | | | | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.400 | 7.300 | 7.536 | 7.620 | 7.630 | 8.001 | 97 | 98 | 96 | 94 | 95 |
| 3 | Konsumsi ikan | | | | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 31,8 | 31,8 | 35,93 | 38,04 | 40 | 99,38 | 96,4 | 105,7 | 108 | 111 |
| 4 | Cakupan bina kelompok nelayan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Produksi perikanan kelompok nelayan | | | | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.400 | 7.300 | 7.536 | 7.620 | 7.630 | 8.001 | 97 | 98 | 96 | 94 | 95 |



2.3.1 Bidang Ketahanan Pangan

Kabupaten Agam termasuk salah satu kabupaten dengan pertanian terbesar di Sumatera Barat. Kabupaten Agam memiliki stock pangan 300% lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, sehingga bisa dikatakan Kabupaten Agam adalah salah satu *lumbung beras* di Propinsi Sumatera Barat.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selama tahun 2016 – 2021 telah melakukan berbagai upaya peningkatan ketahanan pangan melalui program dan kegiatan strategis dalam penguatan pangan untuk masyarakat. Pada umumnya ketersediaan bahan pangan strategis di Kabupaten Agam mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama untuk komoditas padi (beras).

Ketahanan Pangan mencakup tiga aspek penting yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan bidang ketahanan pangan yaitu : 1. Ketersediaan yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutunya serta aman, 2. Distribusi pangan adalah pasokan yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga dan, 3. Konsumsi pangan adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta prefrensinya.

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.



Untuk mewujudkan ketahanan pangan, tiga pilar penting yang diperhatikan adalah :

1. Pilar Ketersediaan

Ketersediaan yang dimaksud adalah ketersediaan fisik pangan yang diperoleh baik itu dari hasil produksi domestik, impor, atau perdagangan, maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau tingkat masyarakat.

2. Pilar Akses

Akses yang dimaksud adalah kemampuan seluruh rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan maupun kombinasi diantara kelimanya. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin saja mencukupi, tapi tidak menjamin seluruh rumah tangga mendapatkan akses pangan yang memadai dan beragam.

3. Pilar Pemanfaatan

Pemanfaatan yang dimaksud adalah penggunaan pangan oleh seluruh rumah tangga dan kemampuan masing-masing individu untuk mengonsumsi pangan dan menyerap zat gizi. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi kebersihan, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu.



Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menargetkan pembangunan sektor pangan berbasis rumah tangga untuk meningkatkan kemandirian dan keamanan pangan non beras untuk kebutuhan rumah tangga. Sehingga dengan kegiatan tersebut bisa mendapatkan hasil yang optimal yaitu ketersediaan pangan yang memadai dan keberagaman hasil pangan untuk konsumsi pangan masyarakat khususnya dalam skala rumah tangga.

Kemampuan teknis dibidang pangan perlu ditingkatkan guna mewujudkan pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Memperhatikan beberapa unsur pokok dasar evaluasi yang telah dilakukan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Pemerataan distribusi pangan; 2. Penganekaragaman konsumsi pangan; 3. Keamanan Pangan Konsumsi.

2.3.2 Bidang Perikanan

1. Kontribusi lap. Usaha perikanan terhadap PDRB Sub Sektor Perikanan Kabupaten Agam

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antar. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah merupakan



kontribusi dari berbagai sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalan; sektor industri pengolahan; sektor listrik; gas dan air bersih; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan; persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa.

Sektor pertanian mencakup segala perusahaan yang didapat dari alam dan merupakan barang-barang biologis atau hidup, dimana hasilnya akan digunakan untuk memenuhi hidup sendiri atau dijual kepada pihak lain, tidak termasuk kegiatan yang tujuannya untuk hobi. Sektor pertanian meliputi lima subsektor yaitu: subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan.

Sub sektor perikanan mencakup semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun di air asin. Subsektor perikanan memberikan kontribusi berkisar antara 4 % s/d 5 % terhadap sektor pertanian atau berada pada urutan ke-2 pada 3 subsektor cakupan sektor pertanian.

2. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan terdiri dari Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap. Produksi budidaya di Kabupaten adalah Budidaya Perikanan Darat, seperti Karamba, Kolam Air Tenang, Kolam Terpal, Minapadi dan Kolam Sawah. Produksi Tangkap adalah Produksi Perikanan Laut dan PUD.

a. Produksi Budidaya

Dilihat dari Tabel 2.6, Produksi Budidaya cenderung mengalami penurunan. Menurunnya capaian produksi perikanan budidaya ini disebabkan oleh menurunnya



produksi ikan KJA Danau Maninjau. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya kualitas air danau maninjau yang ditandai dengan meningkatnya frekwensi *upwelling* pertahun yang berakibat kematian ikan masal di Danau Maninjau.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas air Danau Maninjau adalah penggunaan KJA yang tidak ramah lingkungan, sistem manajemen pakan yang tidak sesuai, jumlah KJA yang melebihi *carrying capacity* Danau Maninjau serta aktivitas penduduk disekitar danau yang tidak ramah lingkungan.

Walaupun produksi ikan KJA di Danau Maninjau terjadi penurunan, upaya peningkatan produksi perikanan budidaya terus dilaksanakan melalui program pencetakkan lahan usaha budidaya baru masyarakat secara gratis dengan menggunakan escavator, rehabilitasi kolam masyarakat, serta pendistribusian bibit secara gratis untuk kolam masyarakat.

Produksi budidaya untuk kedepannya akan dikembangkan melalui peningkatan produksi perikanan darat, seperti budidaya kolam air tenang, budidaya kolam terpal dan perikanan darat lainnya.

Upaya peningkatan produksi juga dilakukan dengan peningkatan Sarana dan Prasarana benih baik melalui UPR maupun maupun BBI, agar ketergantungan terhadap produksi benih daerah tetangga (Rao Pasaman, Sicincin dan Limapuluh Kota) dapat diminimalisir.

b. Produksi Tangkap

Produksi penangkapan Kabupaten Agam terdiri dari hasil tangkap perairan umum darat dan hasil tangkap laut. Hasil tangkap perairan umum darat (PUD) umumnya berasal dari Danau Maninjau dan sungai yang dilakukan



dengan menggunakan pancing, tombak, jaring ikan dan lukah.

Hasil tangkap laut Kabupaten Agam berasal dari potensi perikanan laut yang dimiliki Agam yaitu memiliki garis pantai sepanjang 43 KM dengan laut seluas 13.760 KM². Wilayah perikanan tangkap nelayan pesisir Kabupaten Agam terbentang sepanjang samudera hindia yang merupakan wilayah yang masih diperbolehkan untuk dilakukan upaya penangkapan.

3. Konsumsi Ikan

Capaian tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Agam dari 2016 sampai 2020 telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun faktor yang menunjang pencapaian target konsumsi di Kabupaten Agam adalah:

- a. Tingginya partisipasi aktif forum peningkatan konsumsi ikan (Forikan) mulai dari tingkat kabupaten hingga nagari. Sinergi kinerja Forikan menyasar hampir disetiap batasan umur dan kelembagaan masyarakat dengan program kegiatan sebagai berikut:
 - Mengaktifkan peran dasawisma dalam pemanfaatan pekarangan untuk memelihara ikan dan mengolahnya untuk usaha dan konsumsi rumah tangga.
 - Memasukkan materi Gemarikan dalam kurikulum sekolah PAUD/TK.
 - Menggiatkan Forikan Nagari untuk mensosialisasikan Gemarikan kepada Masyarakat melalui Posyandu, Posyandu Lansia, Sekolah sekolah dan Jorong-jorong.
- b. Tingginya animo masyarakat untuk makan ikan karena harga terjangkau dan mudah didapat yang didukung oleh meningkatnya jumlah pedagang ikan segar keliling.

4. Cakupan Bina Kelompok Nelayan



Pada intinya semua nelayan yang ada di Kabupaten Agam telah di bina oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, dengan dibentuknya kelompok usaha bersama masyarakat nelayan. Kelompok tersebut memudahkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten untuk memberikan bantuan sebagai upaya memodernisasi alat tangkap berupa pemberian kapal, alat tangkap dan mesin kapal (motor tempel).



Tabel 2.6
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra
Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam
Periode Pelaksanaan : Tahun 2016-2022

| No | Sasaran | Program | Indikator Kinerja | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | Target Renstra SKPD kab/kota Tahun ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke | | | | | Rasio Capaian Tahun ke | | | | |
|----|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Meningkatnya kinerja makro ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah produksi ikan budidaya/tahun (ton) | 85.463 | 50.000 | 89.376 | 94.223 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 55.113 | 48.455 | 46.198 | 45.653 | 25.589 | 61,66 | 51,43 | 84,00 | 91,31 | 51,18 |
| | | | Persentase peningkatan ketersediaan benih ikan (juta ekor) | 250 | 285 | 275 | 275 | 275 | 225 | 225 | 367 | 246 | 235 | 188 | 150 | 133,45 | 89,45 | 85,45 | 83,56 | 66,67 |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah produksi perikanan tangkap/tahun (ton) | 7.300 | 8.441 | 7.500 | 7.725 | 7.957 | 8.195 | 8.441 | 8.310 | 7.536 | 7.620 | 7.630 | 8.001 | 110,80 | 97,55 | 95,76 | 93,11 | 94,79 |
| 2 | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Usaha Sektor Perikanan | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah ikan konsumsi yang dipasarkan dalam daerah/tahun (ton) | 17.172 | 24.840 | 18.240 | 19.800 | 21.420 | 23.100 | 24.840 | 17.666 | 18.270 | 20.120 | 18.270 | 26.150 | 96,85 | 92,27 | 93,93 | 79,09 | 105,3 |
| | | | Jumlah produksi ikan olahan (ton) | 2.833 | 730 | 3.117 | 3.428 | 3.771 | 700 | 730 | 2.373 | 656 | 683 | 699 | 705 | 76,13 | 19,14 | 18,11 | 99,86 | 96,58 |
| | | | Jumlah produksi dan unit pengolahan ikan yang tersertifikasi (sertifikat) | | 50 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 35 | 40 | 47 | 40 | 48 | 117 | 114,29 | 117,50 | 88,89 | 96,00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|-------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|-------|
| | | | Jumlah unit usaha yang meningkat akses permodalan (unit) | | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 200 | 150,00 | 133,33 | 100 | 140,0 |
| | | | Jumlah kelompok lembaga usaha perikanan yang meningkat kelembagaannya (lembaga) | | 15 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 7 | 10 | 13 | 32 | 44 | 117 | 100 | 108 | 229 | 293 |
| 3 | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Dalam Daerah | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Jumlah ketersediaan cadangan pangan pokok daerah (ton) | 62.200 | 63.139 | 62.387 | 62.574 | 62.762 | 62.950 | 63.139 | - | - | 8.758 | 71.727 | 63.190 | - | - | 13,95 | 113,94 | 100 |
| | | | Jumlah konsumsi beras perkapita (kg/kapita/tahun) | 129,10 | 99,90 | 122,65 | 116,51 | 110,69 | 105,15 | 99,90 | - | 113 | 109,6 | 115,40 | 112,11 | - | 96,99 | 99,02 | 109,75 | 112,2 |
| | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase penduduk rawan pangan (%) | 0,47 | 0,28 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | - | - | 0,28 | - | 0,05 | - | - | 82,35 | - | 17,86 |
| | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase peningkatan mutu dan keamanan pangan asal ikan | 20 | 10 | - | 18 | 16 | 14 | 12 | - | 71,50 | 75,00 | 8,40 | 8,00 | - | 397 | 469 | 60,0 | 66,7 |



2.3.3 Indikator Kinerja dalam Aspek Pendanaan

Kinerja aspek pendanaan Kelautan dan Perikanan diukur dengan cara membandingkan target pendanaan dengan realisasinya. Aspek pendanaan dilihat dari pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dibebankan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Sumber pendapatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berasal dari hasil retribusi daerah berupa hasil penjualan bibit BBI, sewa escavator dan cetak label di rumah kemasan. Porsi terbesar penyumbang pendapatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berasal dari sewa exscavator. Sedangkan belanja dinas berupa belanja tidak langsung (gaji pegawai) dan belanja langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Capaian kinerja aspek pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan secara keseluruhan dari tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.23.

Berdasarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang disajikan Tabel 2.23, terlihat bahwa pendapatan yang berasal dari bidang perikanan dan ketahanan pangan lebih rendah dari pada belanja. Hal ini disebabkan karena Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan, penyediaan infrastruktur serta sarana prasarana bidang perikanan dan pangan.



Tabel. 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Pagu Anggaran Tahun ke (Rp.000.000) | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke | | | | | Rasio Capaian Tahun ke | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|----|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | 131.517.500 | - | - | - | - | 126.871.650 | - | - | - | - | 96,47 | - | - | - | - | 26.303.500 | 25.374.330 |
| 2 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 2.327.007.290 | 1.461.721.000 | 1.451.097.500 | 1.198.580.500 | 1.740.670.100 | 2.182.754.101 | 1.441.499.935 | 1.439.316.900 | 1.145.222.202 | 905.424.046 | 93,80 | 98,62 | 99,19 | 95,55 | 52,02 | 1.635.815.278 | 1.422.843.437 |
| 3 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 1.331.481.800 | 1.043.148.000 | 922.027.500 | 1.443.718.000 | 602.500.000 | 1.291.190.733 | 1.032.277.568 | 857.559.700 | 1.005.025.756 | 601.233.956 | 96,97 | 98,96 | 93,01 | 69,61 | 99,8 | 1.068.575.060 | 957.457.543 |
| 4 | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 637.927.500 | - | - | - | - | 622.785.885 | - | - | - | - | 97,63 | - | - | - | - | 127.585.500 | 124.557.177 |
| 5 | Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 258.822.500 | - | - | - | - | 251.333.250 | - | - | - | - | 97,11 | - | - | - | - | 51.764.500 | 50.266.650 |
| 6 | Program Pengembangan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan | 50.000.000 | - | - | - | - | 43.549.000 | - | - | - | - | 87,10 | - | - | - | - | 10.000.000 | 8.709.800 |
| 7 | Program Peningkatan Daya Saing & Konsumsi Produk Perikanan | - | 558.215.000 | 410.810.750 | 290.180.000 | 42.984.350 | - | 543.030.010 | 400.047.100 | 280.420.199 | 42.984.350 | - | 97,28 | 97,38 | 96,64 | 100,0 | 260.438.020 | 253.296.332 |
| 8 | Program Pengelolaan Sistem Usaha Perikanan | - | 258.712.500 | 112.521.750 | 68.650.000 | 602.868.800 | - | 252.601.850 | 111.462.600 | 68.599.000 | 26.238.800 | - | 97,64 | 99,06 | 100 | 4,4 | 208.550.610 | 91.780.450 |
| 9 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | - | 445.006.000 | 792.195.650 | - | - | - | 434.943.800 | 775.558.838 | - | - | - | 97,74 | 97,90 | - | - | 247.440.330 | 242.100.528 |
| 10 | Program Peningkatan Distribusi Pangan | - | - | 116.276.750 | 44.634.400 | - | - | - | 111.702.300 | 44.324.550 | - | - | - | 96,07 | 99,31 | - | 32.182.230 | 31.205.370 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-------------|---------------|-------------|---|---|-------------|---------------|-------------|---|---|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| 11 | Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan | - | - | 296.395.000 | 285.344.000 | - | - | - | 296.295.000 | 284.582.420 | - | - | - | 99,97 | 99,73 | - | 116.347.800 | 116.175.484 |
| 12 | Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | - | - | 111.242.100 | 63.350.000 | - | - | - | 105.986.130 | 61.945.000 | - | - | - | 95,28 | 97,78 | - | 34.918.420 | 33.586.226 |
| 13 | Program Peningkatan Ketersediaan Pangan | - | - | - | 1.216.606.000 | 484.233.900 | - | - | - | 1.182.668.492 | 481.063.250 | - | - | - | 97,21 | 99,35 | 340.167.980 | 332.746.348 |



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam.

Tantangan Dari telaah Rencana Jangka Menengah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Ketahanan Pangan Nasional, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dan Dinas Pangan Propinsi. Analisis RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut:

- a) Penurunan kualitas air perairan umum terutama danau maninjau;
- b) Rendahnya harga jual ikan di tingkat pembudidaya ikan;
- c) Tingginya harga pakan di pasaran;
- d) Rendahnya sarana prasarana penangkapan ikan pada nelayan;
- e) Kondisi iklim laut yang tidak bisa di prediksi;
- f) Rendahnya jenis dan jumlah olahan perikanan yang dihasilkan;
- g) Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk Memanfaatkan Lahan Pekarangan sebagai sumber pangan rumah tangga;
- h) Kondisi Kabupaten Agam yang berada pada zona rawan bencana.



Peluang yang didapat dari telaah Rencana Jangka Menengah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Ketahanan Pangan Nasional, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dan Dinas Pangan Propinsi adalah adalah:

- a. Potensi sektor perikanan dan sektor pangan lainnya di Kabupaten Agam sangat beragam dan masih banyak yang belum termanfaatkan;
- b. Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan serta penetapan undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan sumberdaya perikanan;
- c. Tinggi minat masyarakat untuk berusaha disektor kelautan dan perikanan;
- d. Produk perikanan dan pangan lainnya selalu dibutuhkan oleh masyarakat;
- e. Adanya keragaman kearifan lokal yang menunjang optimalisasi pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya pangan;
- f. Berkembangnya teknologi informasi sebagai sarana transformasi teknologi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas bidang urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan. Begitu juga untuk sektor pangan, peningkatan mutu serta kualitas, kuantitas pangan dan peningkatan stok pangan daerah merupakan tujuan dari tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dirumuskan pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam

| No | Masalah | Masalah Pokok | Akar Masalah |
|----|--|--|--|
| 1 | Investasi mengarah ke lapangan usaha non pertanian dan non perindustrian pengolahan melainkan lebih mengarah ke lapangan usaha perdagangan | Produk Perikanan dan Pangan yang dihasilkan kurang memiliki nilai tambah | Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang peningkatan nilai tambah produk |
| 2 | Pertumbuhan industri sangat rendah, semakin terpuruk dengan terjadinya pandemic | Rendahnya daya beli masyarakat | Nilai tukar masyarakat menurun |



| | | | |
|---|--|---|--|
| | Perdagangan didominasi produk primer, tidak memberi nilai tambah | Produk Perikanan dan Pangan yang dihasilkan kurang memiliki nilai tambah | Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang peningkatan nilai tambah produk |
| 3 | 4 pilar pariwisata belum berkembang | Belum sinerginya pengembangan wisata dengan berbagai sektor ekonomi lainnya | Program yang dirancang belum berbasis pariwisata |

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani ”**.

Dari visi diatas terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu *Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Agam Mandiri dan Berprestasi*. Penjabaran dari visi tersebut adalah:

Agam Maju selalu melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan upaya penyatuan tekad dan semangat dari seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat.

Masyarakat Sejahtera dimaknai sebagai situasi masyarakat Agam yang mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.



Agam Mandiri mengandung arti kemandirian yang mengakar dari nilai agama, sosial budaya dan potensi daerah di segala bidang dengan tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan kemitraan dengan persatuan dan kesatuan.

Berprestasi mengandung makna adanya suatu dorongan, bagi daerah pemerintah dan masyarakat Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan usaha sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan terbaik.

3.2.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu:

- a. Menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani.
- b. Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.



- c. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana.
- d. Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter.
- e. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK.

Secara umum Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi melaksanakan tugas Bupati Agam sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 11 Tahun 2016, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan pemerintahan di bidang perikanan dan bidang pangan. Berkaitan dengan RPJMD, secara umum Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berperan pada misi 2 yaitu membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata dan misi 4 yaitu membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter.

Sesuai dengan bidang urusan yang diselenggarakan, maka ada 2 bentuk kontribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam mengemban misi 2 dan misi 4 pada RPJMD yaitu :

- a. Bidang urusan Kelautan dan Perikanan berperan dalam peningkatan daya saing ekonomi sektor perikanan dengan cara menstimulasi dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan pada sektor perikanan.
- b. Bidang urusan pangan berperan dalam penyelenggaraan ketersediaan, distribusi, keanekaragaman, mutu dan keamanan pangan dalam daerah. Urusan pangan ini merupakan salah satu indikator kemapanan ekonomi suatu



wilayah/ daerah. Kabupaten Agam bisa dikatakan kondisi perekonomiannya berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan jika kebutuhan pangan masyarakatnya terpenuhi secara kualitas dan kuantitas.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dipaparkan pada Tabel 3.1. di atas, dan dikaitkan dengan telaah visi dan misi Bupati terpilih selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat tersebut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Agam

| No | Misi Bupati dan Wakil Bupati | Permasalahan Pelayanan Dinas | Faktor | |
|------------------|--|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| Perikanan | | | | |
| 1 | Misi 2 : Membangun Perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata | Tugas dan fungsi struktur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan belum sesuai dengan Tupoksi | Penempatan Pekerjaan tidak sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan | Animo masyarakat cukup tinggi untuk melakukan usaha budidaya |
| | | Sering terjadinya rangkap dan kekosongan jabatan | Terbatasnya Sumberdaya Manusia DKPP | Banyaknya jumlah masyarakat yang memerlukan bimbingan teknis. |
| | Sasaran : Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha perikanan | Kurangnya sarana dan prasarana dinas | Unit usaha dinas tidak beroperasi secara optimal | Potensi sumberdaya yang cukup besar dan Revitalisasi Sistem Produksi |
| | | Kurangnya sarana dan prasarana dinas | Tidak adanya recovery dan pembaharuan peralatan/mesin dan kendaraan dinas | Tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan program yang dicanangkan dinas |
| | | Menurunnya daya dukung perairan dan lingkungannya | Tingginya tingkat pelanggaran aktifitas perikanan | Tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan program yang dicanangkan dinas |



| | | | | |
|---------------|--|--|---|--|
| | | Kurangnya pengembangan Komoditi usaha | Kemampuan masyarakat untuk menerapkan diversifikasi usaha perikanan dan pangan masih rendah | Banyaknya diversifikasi jenis usaha yang belum diterapkan masyarakat |
| | | Rendahnya kemandirian usaha masyarakat | Kurangnya komitmen masyarakat untuk melanjutkan usahanya | Banyaknya diversifikasi jenis usaha yang belum diterapkan masyarakat |
| | | Terbatasnya permodalan usaha | Rendahnya aksesibility perbankan masyarakat | Skim kredit semakin menurun untuk usaha kecil dan menengah |
| | | Rendahnya daya saing produk | Serapann teknologi budidaya masih tergolong rendah | Teknologi perikanan semakin berkembang dan mudah dalam penerapannya |
| Pangan | | | | |
| 2 | Misi 4 : Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter | Rendahnya skor pola pangan harapan masyarakat | Rendahnya diversifikasi pangan masyarakat | Tersedianya bahan pangan lokal yang beranekaragam |
| | | Maraknya pemakaian bahan berbahaya | Tidak terdapatnya sanksi terhadap pelanggaran pemakaian bahan berbahaya | Program pemerintah terkait keamanan pangan |
| | | | SDM teknis pangan yang memiliki kompetensi dibidang pangan | |
| | Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan daerah | Regulasi ketahanan pangan daerah belum ada | Data ketahanan pangan belum terintegrasi | Produksi pangan secara agrerat surplus |
| | | layanan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) belum merata | Terbatasnya modal LDPM pada wilayah tertentu | Produksi pangan tersedia di seluruh wilayah |

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka



visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi Kementerian Kelautan Perikanan adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”*.

Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP



Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dijabarkan pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Agam bertugas dalam menjalankan urusan konkuren bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan sasaran renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

| No | Sasaran Strategis Renstra KKP | Permasalahan Pelayanan Dinas | Faktor | |
|----|--|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, diversifikasi usaha nelayan, dan pengembangan kampung nelayan | Masih terdapatnya tumpang tindih Tugas dan fungsi jabatan di dinas | Pola pikir masyarakat belum berkembang | Usaha nelayan menjadi mata pencaharian utama pada masyarakat |
| 2 | Pengelolaan perikanan di perairan umum | Tingginya pencemaran lingkungan | Kurangnya pembinaan kepada masyarakat | Banyaknya lubuk larangan masyarakat |
| 3 | Pengembangan armada dan alat tangkap ikan | Pelabuhan/dermaga tambat untuk labuh kapal tidak ada | Tidak ada kewenangan untuk membangun pelabuhan di Kabupaten | Potensi Sumberdaya Ikan masih tinggi untuk laut lepas |
| 4 | Pengembangan Kawasan Wisata Bahari | Penurunan kualitas terumbu karang | Pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil tidak kewenangan daerah | Memiliki potensi wisata yang kompleks |
| 5 | Peningkatan Produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya | Banyaknya lahan budidaya yang belum termanfaatkan | Tingginya biaya rehabilitasi kolam | Sarana cetak kolam tersedia |
| 6 | Pengembangan komoditas perikanan budidaya | Mutu produk rendah | Pengembangan mutu produk tidak fokus | Berkembangnya teknologi peningkatan mutu benih |
| 7 | Pengembangan pakan ikan mandiri | Tingkat keberhasilan penerapan teknologi pakan mandiri di masyarakat rendah | Teknologi belum dikuasai | Kebutuhan pakan tinggi karena mahalnnya pakan komersial |



| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 8 | Pengembangan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan dan pengembangan sentra kelautan perikanan terpadu | Belum terkonsentrasinya usaha perikanan dalam satu kawasan | Regulasi penetapan kawasan belum ada | Banyaknya potensi untuk membuat suatu kawasan sentral |
| 9 | Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi budidaya | rendahnya tingkat keamanan produk yang dihasilkan masyarakat | Minimnya aparatur untuk pelaksanaan pembinaan | tuntutan masyarakat akan produk yang aman semakin tinggi |
| 10 | Pelaksanaan Kampanye Gemarikan untuk peningkatan konsumsi dan mengatasi stunting | Masih terbatasnya pengetahuan tentang diversifikasi olahan | sarana sosialisasi kurang memadai | Forikan telah menjalankan Gemarikan sampai pada tingkat nagari dan jorong |
| 11 | Peningkatan nilai tambah UPI menuju <i>zero waste</i> | Sapras UMKM belum memenuhi standar UPI zero waste | Kurangnya sumberdaya aparatur bina mutu | Tingginya minat konsumen terhadap produk yang aman dan bermutu |
| 12 | Peningkatan Sarana dan prasarana rantai dingin, penanganan pasca panen dan peralatan pengolahan | Pemahaman masyarakat tentang mutu pangan masih rendah | Terbatasnya Sarana dan Prasarana pengolahan masyarakat untuk peningkatan mutu | Minat masyarakat untuk memproduksi olahan ikan tinggi |
| 13 | Peningkatan diversifikasi produk hasil perikanan | Pangsa pasar produk masih lokal | Rendahnya produk yang bersertifikasi | Tingginya produksi bahan baku |
| 14 | Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi, pembiayaan, teknologi, dan pasar yang didukung oleh regulasi yang kondusif | Jaminan untuk mendapatkan permodalan terbatas | Anggungan pinjaman terbatas | Rendahnya skim kredit yang ditawarkan untuk usaha kecil dan menengah |

3.4 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian menetapkan visi jangka menengah tahun 2020-2024 yakni: *“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Kementrian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.



Badan Ketahanan Pangan mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu *Mewujudkan Ketahanan Pangan*. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Tabel 3.4
Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pertanian
Tahun 2020-2024 (terkait BKP)

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | | Target | |
|----|---|------------------|---|--------|-------|
| | | | | 2020 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan | 1 | Global Food Security Index /GFSI | 62.6 | 69.8 |
| | | 2 | Skor Pola Pangan Harapan | 90.4 | 95.2 |
| | | 3 | Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/kapita/hari) | 2.1 | 2.1 |
| | | 4 | Angka Kecukupan Protein (AKP) (Kkal/kapita/hari) | 57 | 57 |
| | | 5 | Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevelensi of Undernourishment/PoU (%) | 6.2 | 5 |
| | | 6 | Prevelensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES) | 5.2 | 4 |
| | | 7 | Ketersediaan Beras (juta won) | 39.2 | 46.8 |
| | | 8 | Ketersediaan protein hewani (juta ton) | 2.5 | 2.9 |
| | | 9 | Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% penerima BPNT) | 10-20% | 100% |
| | | 10 | Persentase pangan organik | 5% | 20% |
| 2 | Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian | 1 | Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian | 79.96 | 82.96 |
| | | 2 | Opini BPK RI | WTP | WTP |



Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dijabarkan pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Agam bertugas dalam menjalankan urusan konkuren bidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
berdasarkan sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan

| No | Sasaran Strategis Renstra Pangan | Permasalahan Pelayanan Dinas | Faktor | |
|----|---|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan | Belum semua daerah rawan pangan yang tersentuh oleh Program dan kegiatan dinas | Pembaharuan data tidak terlaksana setiap tahun | Surplus pangan |
| 2 | Menjaga stabilitas pasokan, harga dan akses masyarakat terhadap pangan | layanan Toko Tani Indonesia (TTI) belum merata | Terbatasnya jumlah TTI yang ada | Tidak stabilnya harga bahan pangan pada waktu tertentu |
| 3 | Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal sesuai potensi wilayah | Rendahnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga | Tingginya budaya konsumtif pada masyarakat | Program Pekarangan Pangan Lestari menjangkau hingga rumah tangga |
| 4 | Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) | Rendahnya konsumsi pangan lokal yang beragam | Budaya konsumsi masyarakat bergantung pada 1 komoditi (beras) | Sumberdaya pangan lokal yang berlimpah dan dukungan pemerintah dalam menggiatkan B2SA |
| 5 | Pengawasan kualitas dan keamanan pangan segar asal tumbuhan | Masih terdapatnya pemakaian bahan kimia berbahaya pada pangan segar asal tumbuhan | Kurangnya pengawasan pemerintah dan kesadaran petani dalam penggunaan bahan berbahaya | Adanya regulasi tentang keamanan pangan |



3.5 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”

Untuk mencapai visi tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat terkait dalam pencapaian pada kata sejahtera. Dimana *Sejahtera* dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah bagaimana pendapatan masyarakat meningkat dengan kedua misi diatas. Kondisi dimana mewujudkan ekonomi masyarakat yang tanggung, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Hal tersebut diwujudkan melalui program-program kegiatan yang mengarah kepada peningkatan produksi perikanan, pengembangan kawasan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar ikan.



3.6 Telaahan Renstra Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat

Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan ”**.

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan spiritual.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, juga telah dijabarkan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu : 1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing; 2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara, Basandi Kitabullah; 3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan; 4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital; 5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataaan; 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; 7 Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Misi yang terkait dengan urusan pangan adalah **misi ketiga**, yaitu **“Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan”** dengan tujuan



Meningkatkan Pendapatan Petani, dengan sasaran Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan Masyarakat serta **Misi ke 6** yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan tujuan Meningkatkan Infrastruktur yang handal dan merata dengan sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana.

Tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan hal dimaksud adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan, dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Provinsi di bidang Ketahanan Pangan;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.7 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diudangkannya UU Np. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang , yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 26 tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sangsi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26 tahun



2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kabupaten Agam telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan Hasil KLHS

| No | Hasil KLHS | Permasalahan Pelayanan Dinas | Faktor | |
|----|--|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Peningkatan status gizi pada anak balita | Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga | Juknis P2L belum sesuai dengan penanganan stunting | Program Pekarangan Pangan Lestari menjangkau hingga rumah tangga |
| 2 | Peningkatan kapasitas masyarakat terkait pola konsumsi dan hidup sehat | Rendahnya konsumsi pangan lokal yang beragam | Budaya konsumsi masyarakat bergantung pada 1 komoditi (beras) | Sumberdaya pangan lokal yang berlimpah dan dukungan pemerintah dalam menggiatkan B2SA |
| 3 | Meningkatkan pengendalian keamanan pangan | Masih terdapatnya pemakaian bahan kimia berbahaya pada pangan segar asal tumbuhan | Kurangnya pengawasan pemerintah dan kesadaran petani dalam penggunaan bahan berbahaya | Adanya regulasi tentang keamanan pangan |
| 4 | Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pangan | Daya saing produk pangan masih rendah | Modal pelaku usaha terbatas | Meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat |

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam berperan dalam merumuskan dan menyelenggarakan pembangunan sektor kelautan



dan perikanan serta pangan yang mengikuti kaedah tata ruang wilayah yang telah ditetapkan untuk Kabupaten Agam.

3.8 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Agam dan telaahan terhadap Renstra Kementrian, Renstra Dinas Provinsi, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat teridentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Agam meliputi berbagai aspek yaitu :

Tabel 3.7

Isu-isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam berdasarkan Bobot dan Prioritas Masalah

| No | Isu Strategis | Bobot | Prioritas |
|------------------|---|-------|-----------|
| PERIKANAN | | | |
| 1 | Menurunnya produksi perikanan | 84,58 | I |
| 2 | Menurunnya daya dukung perairan dan lingkungannya | 83,75 | II |
| 3 | Produk Perikanan yang dihasilkan kurang memiliki nilai tambah | 83,75 | II |
| 4 | Pemahaman masyarakat tentang mutu produk perikanan masih rendah | 81,25 | III |
| 5 | Belum terkonsentrasinya usaha perikanan dalam satu kawasan | 80,00 | IV |
| 6 | Masih terbatasnya pengetahuan tentang diversifikasi olahan | 79,58 | V |
| 7 | Belum sinerginya pengembangan wisata dengan sektor Perikanan | 77,50 | VI |
| 8 | Rendahnya kemandirian usaha masyarakat | 77,08 | VII |
| 9 | Jaminan untuk mendapatkan permodalan terbatas | 72,92 | VIII |
| 10 | Sapras UMKM belum memenuhi standar UPI zero waste | 68,33 | VIII |
| PANGAN | | | |
| 1 | Belum adanya regulasi ketahanan pangan daerah | 90,00 | I |
| 2 | Maraknya pemakaian bahan berbahaya pada bahan pangan segar | 85,63 | II |
| 3 | Masih adanya daerah rawan pangan di Kabupaten Agam | 80,00 | III |
| 4 | Layanan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) belum merata | 76,88 | IV |
| 5 | Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga | 73,13 | V |
| 6 | Rendahnya skor pola pangan harapan masyarakat | 71,88 | VI |
| 7 | Belum sinerginya pengembangan wisata dengan sektor pangan | 65,00 | VII |
| 8 | Produk Pangan yang dihasilkan kurang memiliki nilai tambah | 61,88 | VIII |



Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa permasalahan di Bidang Perikanan terkait dengan produksi perikanan yang dihasilkan terutama di bidang budidaya. Untuk Bidang Pangan permasalahan pokok yang dihadapi adalah belum tersedianya regulasi terkait dengan Ketahanan Pangan Daerah.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan target strategis organisasi yang bersifat kualitatif dan menjadi prioritas tertinggi dalam rencana strategis Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam yang dijabarkan dalam misi 2 dan misi 4 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agama adalah sebagai berikut :

Tujuan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah :

- a. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat
- b. Terwujudnya sumberdaya manusia yang mandiri dan berdaya saing

Sasaran pembangunan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tahun 2021-2026 adalah :

- a. Mengembangkan potensi kawasan perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan
- b. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

Indikator sasaran pembangunan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah:

- a. Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)
- b. Indeks ketahanan pangan daerah

Tabel 4.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Visi, Misi dan Tujuan RPJMD

| VISI | |
|--|---|
| Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani | |
| MISI 2 RPJMD | MISI 4 RPJMD |
| Membangun Perekonomian Masyarakat Yang Kokoh Melalui Optimalisasi Sumber Daya Daerah Dan Pengembangan Pariwisata | Membangun Masyarakat Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkualitas dan Berkararakter |
| TUJUAN I | TUJUAN 2 |
| Meningkatnya Pendapatan Dan Daya Beli Masyarakat | Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing |
| Indikator | Indikator |
| Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita | Indeks Ketahanan Pangan Daerah |
| SASARAN 1 | SASARAN 2 |
| Mengembangkan Potensi Kawasan Perikanan Tangkap dan Budidaya secara Berkelanjutnya | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah |
| Indikator | Indikator |
| Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK) | Indeks Ketahanan Pangan Daerah |
| TUJUAN RENSTRA | TUJUAN RENSTRA |
| Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah |
| Indikator | Indikator |
| Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB | Indeks Ketahanan Pangan Daerah |
| SASARAN | SASARAN |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap 2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya 3. Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah 2. Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan 3. Meningkatkan Diversifikasi Pangan 4. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah |
| Indikator | Indikator |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 3. Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Ketersediaan Pangan Daerah 2. Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Daerah 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Nilai RB Perangkat Daerah Berdasarkan PMPRB |



Adapun rincian target kinerja tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat dari Tabel 4.2.berikut

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam

| NO | TUJUAN | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Rumusan Indikator Sasaran | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| Misi 4 :Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter | | | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatnya ketahanan pangan daerah | | Indeks ketahanan pangan daerah | Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/ akses pangan | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| | | Meningkatnya ketersediaan pangan | Persentase ketersediaan pangan daerah | Jumlah produksi beras bagi jumlah penduduk kali seratus persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Menurunnya tingkat kerawanan pangan | Persentase penanganan kerawanan pangan daerah | Jumlah penanganan kerawanan pangan yang dilaksanakan bagi jumlah penanganan kerawanan pangan yang direncanakan dikali seratus persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya diversifikasi pangan | Skor pola pangan harapan (PPH) | Persen AKG kali bobot masing-masing kelompok pangan | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Misi 2 : Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|------|------|------|------|------|------|
| 2. | Meningkatnya produksi usaha perikanan | | Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB | Jumlah PDRB yang berasal dari sektor perikanan dalam bentuk persentase (%). (data laju ADHK statistik) | 4,68 | 4,71 | 4,75 | 4,80 | 4,86 | 4,90 |
| | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap | Produksi Tangkap (n) - Produksi Tangkap Tahun (n-1) / Produksi Tangkap Tahun (n-1) * 100% n = tahun pengamatan n-1 = tahun pengamatan sebelumnya | 1,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,12 |
| | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | Produksi Budidaya Tahun - Produksi Budidaya Tahun (n-1) / Produksi Budidaya Tahun (n-1) * 100% n = tahun pengamatan n-1 = tahun pengamatan sebelumnya | 7 | 9 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| | | Meningkatnya produksi olahan perikanan | Persentase peningkatan produksi olahan perikanan | Produksi Olahan Perikanan Tahun (n) - Produksi Olahan Perikanan Tahun (n-1) / Produksi Olahan Perikanan Tahun (n-1) * 100% n = tahun pengamatan n-1 = tahun pengamatan sebelumnya | 1,41 | 1,53 | 1,23 | 1,36 | 1,34 | 1,32 |
| 3. | Meningkatnya Nilai RB berdasarkan PMPRB | Meningkatnya tata kelola OPD | Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB | LHE inspektorat | 75 | 75 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 |



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk memperoleh formulasi strategi yang tepat digunakan analisis SWOT. Untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi setiap aktivitas pembangunan perikanan dan pangan yang dibagi dalam kategori kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan akan dijabarkan sebagaimana berikut ini.

Kekuatan (*Strengths*)

Beberapa kekuatan (*strengths*) yang dimiliki antara lain:

- a. Sumber daya perikanan melimpah;
- b. Tingginya minat masyarakat dalam usaha perikanan;
- c. Produk perikanan yang dihasilkan beragam;
- d. Usaha perikanan sudah menjadi budaya di masyarakat;
- e. Produksi pangan melimpah;
- f. Beragamnya jenis pangan lokal yang ada di masyarakat.

Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan (*weaknesses*) yang diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Menurunnya kualitas perairan;
- b. Rendahnya daya saing produk perikanan;
- c. Kurangnya kuantitas SDM Aparatur dan kualitas SDM masyarakat;
- d. Belum terintegrasinya usaha perikanan dari hulu ke hilir;
- e. Terbatasnya sarana prasarana perikanan yang tersedia;
- f. Rendahnya nilai skor PPH;
- g. Masih adanya daerah yang rawan pangan;
- h. Rendahnya mutu dan keamanan pangan;



- i. Belum optimalnya fungsi lembaga/unit pendistribusian pangan;
- j. Mayoritas wilayah di Kabupaten Agam merupakan daerah rawan bencana.

Peluang (*Opportunities*)

- a. Meningkatnya permintaan produk perikanan;
- b. Terbukanya akses permodalan dari lembaga keuangan;
- c. Teknologi perikanan mudah diadaptasi;
- d. Terbukanya peluang diversifikasi usaha dengan sektor lain;
- e. Tingginya dukungan program kegiatan dari Pemerintah Pusat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pangan;
- f. Adanya regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Ketahanan Pangan;
- g. Berkembangnya teknologi informasi dan transportasi pendistribusian pangan;
- h. Bergesernya tren konsumsi masyarakat kearah olahan non beras.

Ancaman (*Treats*)

Beberapa ancaman yang perlu di antisipasi antara lain:

- a. Berkembangnya usaha perikanan di daerah lain;
- b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.
- c. Distribusi padi yang dikuasai oleh tengkulak daerah lain;
- d. Masuknya bahan pangan yang terkontaminasi bahan kimia berbahaya dari luar daerah;
- e. Tingginya pengaruh globalisasi industri pangan.



Tabel 5.1
Analisis SWOT Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Bidang Perikanan

| Faktor | Internal | Eksternal |
|----------------|--|---|
| Positif | Kekuatan | Peluang |
| | Sumber daya perikanan melimpah | Meningkatnya permintaan produk perikanan |
| | Tingginya minat masyarakat dalam usaha perikanan | Terbukanya akses permodalan dari lembaga keuangan |
| | Produk perikanan yang dihasilkan beragam | Teknologi perikanan mudah diadaptasi |
| | Usaha perikanan sudah menjadi budaya di masyarakat | Terbukanya peluang diversifikasi usaha dengan sektor lain |
| Negatif | Kelemahan | Ancaman |
| | Menurunnya kualitas perairan | Berkembangnya usaha perikanan di daerah lain |
| | Daya saing produk rendah | Undang undang perlindungan konsumen |
| | Rendahnya kualitas SDM Aparatur dan masyarakat | Banyaknya produk sejenis yang masuk dari luar daerah |
| | Belum terintegrasinya usaha perikanan dari hulu ke hilir | Tingginya harga pakan pabrikan |
| | Terbatasnya sarana prasarana perikanan | |

Analisis SWOT dipergunakan untuk memperoleh formulasi strategi dan prioritas yang tepat antara perikanan dan pangan, sehingga akan ditemukan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman terkait bidang masing- masing. Analisis SWOT tersebut diuraikan dalam tabel 5.1 dan 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Analisis SWOT Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Bidang Pangan

| Faktor | Internal | Eksternal |
|----------------|--|--|
| Positif | Kekuatan | Peluang |
| | Produksi pangan melimpah | Tingginya dukungan program kegiatan dari pemerintah pusat |
| | Jenis pangan lokal beragam | Adanya regulasi dari pemerintah pusat terkait ketahanan pangan |
| | Lembaga/unit pendistribusian pangan terdapat di setiap wilayah | Berkembangnya teknologi informasi dan transportasi |
| | Tingginya potensi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan | Terbukanya peluang kerjasama dengan daerah tetangga |



| | | |
|----------------|---|--|
| | Adanya produk pangan yang telah teregistrasi dan tersertifikasi | Bergesernya tren konsumsi masyarakat kearah olahan non beras |
| Negatif | Kelemahan | Ancaman |
| | Rendahnya nilai skor PPH | Distribusi padi dikuasai oleh tengkulak dari luar daerah |
| | Masih adanya daerah yang rawan pangan | Masuknya bahan pangan yang terkontaminasi bahan kimia berbahaya dari luar daerah |
| | Rendahnya mutu dan keamanan pangan | Tingginya pengaruh globalisasi industri pangan |
| | Belum optimalnya fungsi Lembaga/unit pendistribusian pangan | |
| | Mayoritas wilayah di Kabupaten Agam merupakan rawan bencana | |

5.2 Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2021-2026.

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara mencapai sasaran sebagaimana ditunjukkan oleh indicator kinerja sasaran. Adapun strategi dan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5.3
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam

| Visi : Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, masyarakat sejahtera, menuju Agam mandiri, berprestasi yang madani | | | |
|--|---|---|---|
| Misi 2 : Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat | Mengembangkan potensi kawasan perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan | Mengembangkan potensi kawasan perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan | Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan tangkap berkelanjutan |
| | | | Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan budidaya berkelanjutan |
| | | | Peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan |
| | | | Peningkatan pengawasan usaha perikanan |
| Misi 4 : Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter | | | |
| Terwujudnya sumberdaya manusia yang mandiri dan berdaya saing | Meningkatnya ketahanan pangan daerah | Meningkatkan kemandirian pangan | Peningkatan kemandirian pangan |
| | | Mencegah terjadinya kerawanan pangan masyarakat | Peningkatan kewaspadaan dan pencegahan terjadinya kerawanan pangan masyarakat |
| | | Meningkatkan keamanan pangan | Peningkatan pengawasan dan pengendalian keamanan pangan |



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah daerah dengan Dinas terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Dinas. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya kedalam penyusunan program prioritas. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam 2021-2026 merupakan awal pijakan Dinas dalam perumusan program, kegiatan serta sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikasi rencana program prioritas OPD berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra Dinas, termasuk dalam menjabarkannya kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang



bersumber dari APBD Kabupaten Agam, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam yang dirumuskan memuat rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam

TABEL TERPISAH (program exel)



| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|---------------------------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|-----------|----------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | |
| | | | | | | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | | | Target | Rp (juta) |
| 1 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya rumpun/rasau | | 74 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya kapal lengkap < 5 GT untuk perairan laut | | 2 unit | | 2 unit | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya alat penangkapan ikan | | | 500 pis | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya mesin untuk kapal < 5 GT | | | 3 unit | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya kapal lengkap < 3 GT | | | 2 unit | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan | | | 25 unit | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya prasarana tempat pelelangan ikan (TPI) non pelabuhan | | | | | | | | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya prasarana tempat sandar mini bongkar muat hasil tangkap nelayan | | | | | | | | 1 unit | | | | | | | |
| | | | 1 3 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia (unit) | | 5 | 244 unit | 250 unit | 255 unit | 300 unit | | | | | | | | |
| | | | | Terlaksananya restocking ikan | | | 150.000 ekor | 200.000 ekor | 100.000 ekor | 100.000 ekor | 100.000 ekor | | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya rumpun/rasau tempat lindung ikan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya sarana operasional tempat pelelangan ikan (TPI) non pelabuhan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kab/kota | Jumlah nelayan kecil yang terfasilitasi sarana kenelayannya | | 75 orang | 5 75 orang | 5 75 orang | 5 75 orang | 5 75 orang | 5 75 orang | 5 75 orang | 5 | | | | | |
| | | | 2 1 | Pengembangan kapasitas nelayan kecil | Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang) | | | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya armada penangkapan ikan lengkap < 5 GT | | | | 4 unit | 6 unit | 8 unit | 10 unit | | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya alat penangkapan ikan | | | | 140 unit | 100 unit | 100 unit | 100 unit | | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya mesin untuk armada penangkapan ikan < 5 GT | | | | 5 unit | 6 unit | 8 unit | 10 unit | | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya alat bantu penangkapan ikan | | | | 8 unit | 8 unit | 8 unit | 10 unit | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|---------------------------------|--|--|---|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | |
| | | | | | | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | | | Target | Rp (juta) |
| 1 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya pelatihan teknis dan manajemen perikanan tangkap | | | | | 30 orang | | 30 orang | | 30 orang | | | | | | |
| | | | | Terlaksananya asilias akses permodalan pelaku usaha perikanan tangkap (Nelayan) | | | | | 30 orang | | 30 orang | | 30 orang | | | | | | |
| | | | 2 2 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | | | | Fasilitasi kelembagaan hukum, asuransi nelayan, sehat nelayan | | | 1 KUB | | 1 KUB | | 1 KUB | | 1 KUB | | | | | | |
| | | | | Terlaksananya pelatihan manajemen kelembagaan nelayan | | | | | 10 orang | | 10 orang | | 10 orang | | | | | | |
| | | | 3 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tersedia | | | 1 unit | 20 | 1 unit | 25 | 1 unit | 25 | 1 unit | 25 | | | | | |
| | | | 3 1 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) (layanan) | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | Terlaksananya pelayanan TPI | | | | | | | | | 1 unit | | | | | | |
| | | | 4 | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota Jumlah kapal perikanan yang terdaftar | | 0 | 5 TDP | 5 | 10 TDP | 5 | 20 TDP | 5 | 30 TDP | 5 | 40 TDP | 5 | | | |
| | | | 4 1 | Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah rekomendasi persetujuan pengadaan kapal perikanan (PPKP) yang diterbitkan (dokumen) | | | | | 10 dokumen | | 10 dokumen | | 10 dokumen | | 10 dokumen | | | | |
| | | | | Terfasilitasi perizinan usaha kenelayanan | | | | | 10 izin usaha | | | | |
| | | | | Tersosialisasi prosedur dan persyaratan pengurusan perizinan | | | | | 30 org | | 30 org | | 30 org | | 30 org | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|--|---|--|---|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | |
| | | | | | | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | | | Target | Rp (juta) |
| 1 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 25,589 | 27,500 | 988.85 | 30,000 | 1,354 | 30,250 | 1,354 | 30,500 | 1,354 | 30,750 | 1,354 | 31,000 | 1,354 | | |
| | | | 1 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) daerah kab/kota | Jumlah unit usaha budidaya yang memiliki izin usaha/landa daftar | | 10 unit usaha | 10 unit usaha | 48 | 10 unit usaha | 48 | 10 unit usaha | 48 | 10 unit usaha | 48 | 10 unit usaha | 48 | | | |
| | | | 1 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) daerah kab/kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (rekomendasi) | Jumlah rekomendasi pertizinan berusaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kab/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing (rekomendasi) | | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | | | |
| | | | | Tersedianya regulasi dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan dan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) | | | | | 1 dokumen | 20 | 1 dokumen | 20 | 1 dokumen | 20 | 1 dokumen | 20 | | | |
| | | | | Terlaksananya sosialisasi penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan dan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) | | | | | 100 unit usaha | 50 | 100 unit usaha | 50 | 100 unit usaha | 50 | 100 unit usaha | 50 | | | |
| | | | | Terlaksananya pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan dan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) | | | | | 20 unit usaha | 10 | 20 unit usaha | 10 | 20 unit usaha | 10 | 20 unit usaha | 10 | | | |
| | | | 2 Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil | Produktivitas rata-rata pembudidayaan ikan (ton/org/th) | 1.92 | 1.92 ton/org/ tahun | 0 | 2,65/ton/ org/th | 123.56 | 2.95 ton/org/th | 628 | 3,18 ton/ org/th | 641 | 3,4 ton/org/th | 641 | 3,61 ton/org/ th | 641 | | |
| | | | 2.1 Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil | Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas (kelompok) | | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | | | |
| | | | | Tersedianya/ meningkatnya fungsi sarana prasarana unit pembenihan ikan rakyat (UPR) | | | | | 2 UPR | 600 | 2 UPR | 600 | 2 UPR | 600 | 2 UPR | 600 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|---------------------------------|---|--|---|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | |
| | | | | | | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | | | Target | Rp (juta) |
| 1 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya/meningkatnya sarana prasarana produksi budidaya ikan pada pembudidaya ikan kecil | | 19 pokdakan | 332.5 | 15 pokdakan | 750 | | | | |
| | | | | Tersedianya induk/calon induk ikan unggul untuk unit pembenihan rakyat (UPR) | | 5 UPR | 100 | 5 UPR | 100 | 5 UPR | 100 | 5 UPR | 100 | 5 UPR | 100 | | | | |
| | | | | Terlaksananya cetak kolam/pengerukan kolam masyarakat | | 5 Ha | 100 | 5 Ha | 100 | 5 Ha | 100 | 5 Ha | 100 | 5 Ha | 100 | | | | |
| | | | | Terlaksananya pelatihan teknis budidaya ikan | | 100 org | 50 | 100 org | 50 | 100 org | 50 | 100 org | 50 | 100 org | 50 | | | | |
| | | | | Terfasilitasinya sertifikat cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) pada unit usaha budidaya dan pembenihan | | 30 sertifikat | 15 | 30 sertifikat | 15 | 50 sertifikat | 15 | 50 sertifikat | 15 | 50 sertifikat | 15 | | | | |
| | | | | Terdistribusinya benih ikan untuk kolam masyarakat dan kolam terlarang | | 350 ribu ekor | 40 | 350 ribu ekor | 60 | | | | |
| | | | | Terlaksananya pengembangan kapasitas pembudidaya ikan di kawasan perikanan budidaya bertema wisata | | | | 4 pokdakan | 200 | 6 pokdakan | 300 | 6 pokdakan | 300 | 6 pokdakan | 300 | | | | |
| | | | | Terlaksananya fasilitasi akses permodalan pelaku usaha budidaya ikan | | | | 5 unit usaha | 10 | | | | |
| | | | | Terfasilitasi proses asuransi unit usaha budidaya ikan | | | | 10 unit usaha | 10 | | | | |
| | | | | Terfasilitasinya proses sertifikasi lahan pembudidaya ikan | | | | 10 sertifikat | 10 | | | | |
| | | | 2 2 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | na | | na | | na | | na | | | | | |
| | | | | Terfasilitasinya proses badan hukum pokdakan | | | | 2 pokdakan | 10 | | | | |
| | | | | Terlaksananya apresiasi kelompok pembudidaya ikan tingkat kabupaten, provinsi dan Nasional (POKDAKAN) | | | | 4 ktgon | 60 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|---------------------------------|---|--|---|-----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------------------------------|-------------|--------|-----------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | |
| | | | | | | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | | | Target | Rp (juta) |
| 1 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| | | | | Terlaksananya fasilitasi pelatihan manajemen kelembagaan pembudidaya ikan | | | | | 20 org | | 10 org | | 10 org | | | | | | |
| | | | 3 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah pembudidaya ikan yang terfasilitasi/terlayani sarana prasarana penunjang kawasan budidaya (pembudidaya) | 1200 | 1200 | 1260 | 1,182.440 | 1300 | 678 | 1350 | 665 | 1400 | 665 | 1500 | 665 | | |
| | | | 3 | 1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota (dokumen) | | | 1 dokmen | | 1 dokmen | | 1 dokmen | | 1 dokmen | | 1 dokmen | | | |
| | | | | | Tersedianya data perikanan budidaya | | | 1 dokmen | 5 | 1 dokmen | 25 | 1 dokmen | 25 | 1 dokmen | 25 | 1 dokmen | 25 | | |
| | | | | | Tersedianya operasional dan perangkat teknologi informasi perikanan budidaya | | | 20 | 2 unit | 20 | 2 unit | | |
| | | | | | Tersedianya perangkat informasi konvensional | | | 15 | 2 unit | 15 | 2 unit | | |
| | | | | | Tersedianya peraturan (Perda dan Perbub) tentang pengelolaan perikanan budidaya terkait dengan penataan KJA, pengelolaan BBI, pengembangan kawasan dan kegiatan budidaya lainnya | | | | 3 peraturan | 200 | 2 peraturan | 120 | 2 peraturan | 120 | 2 peraturan | 120 | 2 peraturan | | |
| | | | | | Tersedianya masterplan pengembangan kawasan perikanan budidaya | | | | 1 dokum | 200 | 1 dokum | 200 | 1 dokum | 200 | | | | | |
| | | | 3 | 2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota (Unit) | | | na | | na | | na | | na | | na | | | |
| | | | | | Tersedianya/ meningkatnya fungsi prasarana kolam BBI | | | | | 6 unit | 900 | 4 unit | 800 | 4 unit | 800 | 4 unit | 800 | | |
| | | | | | Tersedianya/ meningkatnya fungsi bangunan gedung/ pagar/ jalan perkantoran POSIKANDU | | | | | 1 unit | 100 | 1 unit | 100 | 1 unit | 100 | 1 unit | 100 | | |
| | | | | | Tersedianya/ meningkatnya prasarana di kawasan budidaya | | | | | 3 unit | 600 | 3 unit | 600 | 3 unit | 600 | 3 unit | 600 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|---|--|--|---|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | |
| | | | | | | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | | | Target | Rp (juta) |
| 1 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| | | | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan yang memiliki NIB pada tahun berjalan | na | 20 | - | 20 | - | 20 | 100 | 20 | 135 | 20 | 150 | 20 | 145 | | |
| | | | 1 Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam kab/kota | Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan yang telah memiliki izin usaha terhadap peraturan | na | 100% | | 100% | 120 | 100% | 100 | 100% | 135 | 100% | 150 | 100% | 145 | | |
| | | | 1 1 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam kab/kota | Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kab/kota (dokumen) | | | | | na | | na | | na | | na | | na | | |
| | | | | Tersedianya regulasi dan prosedur pengawasan perikanan budidaya | | | | 1 dokmen | 20 | 1 dokmen | 20 | 1 dokmen | 20 | 1 dokmen | 20 | 1 dokmen | 20 | | |
| | | | | Terlaksananya sosialisasi pengawasan perikanan budidaya | | | | 100 unit usaha | 50 | 100 unit usaha | 50 | 100 unit usaha | 50 | 100 unit usaha | 50 | 100 unit usaha | 50 | | |
| | | | | Terlaksananya pengawasan perikanan budidaya | | | | 100 unit usaha | 50 | 100 unit usaha | 50 | 100 unit usaha | 50 | 100 unit usaha | 50 | 100 unit usaha | 50 | | |
| | | | 1 2 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kab/Kota | Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kab/Kota | | | | | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | Terlaksananya sosialisasi penangkapan ikan ramah lingkungan | | | | | | | 20 klmpok | 50 | 20 klmpok | 50 | 20 klmpok | 50 | | | |
| | | | | Pengadaan plang pekarangan penggunaan alat tangkap yang dilarang | | | | | | | 1 paket | 20 | 1 paket | 20 | 1 paket | 20 | | | |
| | | | | Pengawasan perikanan tangkap | | | | | | | 15 unit usha | 50 | 15 unit usha | 50 | 15 unit usha | 50 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|--|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | |
| | | | | | | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | | | Target | Rp (juta) |
| 1 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| | | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan (orang) | 288 | 298 | 185.44 | 308 | 985 | 318 | 385 | 328 | 400 | 338 | 415 | 348 | 425 | | |
| | | | 1 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran yang terdaftar | 0 NIB Berbasis Resiko | 10 NIB | 16.54 | 10 NIB | 23.5 | 10 NIB | 20.5 | 10 NIB | 21 | 10 NIB | 21 | 10 NIB | 21 | | |
| | | | 1.1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (dokumen) | 1 | 1 | 16.54 | 1 | 23.50 | 1 | 20.5 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | | |
| | | | | Tersedianya data pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | | 4 laprn | 15 | 4 laprn | 17.50 | 4 laprn | 15 | 4 laprn | 15 | 4 laprn | 15 | 4 laprn | 15 | | |
| | | | | Tersedianya laporan dan penyajian data informasi pasar | | 12 laprn | 0.54 | 12 laprn | 1 | 12 laprn | 0.50 | 12 laprn | 1 | 12 laprn | 1 | 12 laprn | 1 | | |
| | | | | Verifikasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan | | 12 bulan | 1 | 12 bulan | 5 | 12 bulan | 5 | | |
| | | | 2 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Jumlah unit usaha yang memenuhi standar keamanan pangan | | 5 unit/th | 62 | 5 unit/th | 432.5 | 5 unit/th | 61.5 | 5 unit/th | 105 | 5 unit/th | 121 | 5 unit/th | 101 | | |
| | | | 2.1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko (unit usaha) | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| | | | | Pembinaan dan fasilitasi penerbitan SKP | 1 unit | 2 unit/th | 13 | 2 unit/th | 10 | 2 unit/th | 11.50 | 2 unit/th | 10 | 2 unit/th | 10 | 2 unit/th | 10 | | |
| | | | | Pelatihan diversifikasi olahan | 30 org/th | 30 org | 15 | 30 org | 30 | 30 org | 15 | 30 org | 12.5 | 30 org | 15 | 30 org | 15 | | |
| | | | | Pelatihan teknis produk perikanan kreatif | 0 | 20 org | 15 | 20 org | 25 | 20 org | 15 | 20 org | 12.5 | 20 org | 15 | 20 org | 15 | | |
| | | | | Sosialisasi keamanan produk perikanan | 25 org/th | 15 org | 7 | 25 org | 25 | 25 org | 10 | 25 org | 10 | 25 org | 10 | 25 org | 10 | | |
| | | | | Pembinaan dan pengawasan mutu produk perikanan | ada | 12 bulan | 11.5 | 12 bulan | 15 | 12 bulan | 10 | 12 bulan | 10 | 12 bulan | 10 | 12 bulan | 10 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------|---------------------------------|--|--|---|-----------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|--|--|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | | | |
| | | | | | | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | | | Target | Rp (juta) | | |
| 1 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Jumlah ikan yang dipasarkan dalam daerah | 26640 ton | 107.4 | 27140 ton | 856.5 | 27640 ton | 303 | 28140 ton | 274 | 28640 ton | 273 | 29140 ton | 303 | | | | |
| | | | 3 | 1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kab/kota (ton) | 26,150 | 26,640 | 33 | 27,140 | 193 | 27,640 | 75 | 28,140 | 108 | 28,640 | 78 | 29,140 | 108 | | | |
| | | | | | Jumlah lomba forikan yang diikuti | 4 kategori/th | | 4 kategori | 15 | 4 kategori | 15 | | | | |
| | | | | | Jumlah lomba forikan yang dilaksanakan | 3 kategori/th | | 3 kategori | 50 | 3 kategori | 20 | 3 kategori | 20 | 3 kategori | 20 | 3 kategori | 20 | | | | |
| | | | | | Jumlah mobil ATI yang direhab | | | 1 paket | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah sosialisasi gemarikan yang dilaksanakan | 15 kali/th | 4 | 5 | 15 kali | 18 | 15 kali | 15 | 15 kali | 18 | 15 kali | 18 | 15 kali | 18 | | | |
| | | | | | Jumlah rakor forikan tk.kab & provinsi yang dilaksanakan | 2 kali/th | | 18 | 2 kali | 15 | 2 kali | 15 | | | |
| | | | | | Pengadaan sarana sosialisasi gemarikan (balho, poster, leaflet, banner) | 2 macam (balho/banner, leaflet) | 1 macam | 10 | 2 macam (balho, banner) | 15 | 2 macam (balho, banner) | 10 | 2 macam (balho, banner) | 10 | 2 macam (balho, banner) | 10 | 2 macam (balho, banner) | 10 | | | |
| | | | | | Mengikuti festival/study banding gemarikan keluarga beresiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan | 1 kali | - | - | 1 kali, 80 org | 30 | 30 | 1 kali 100 KK | 50 | 1 kali 800 KK | 200 | 1 kali 800 KK | 200 | 1 kali 800 KK | 200 | | |
| | | | 3 | 2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kab/kota (pelaku usaha) | 5 pelaku usaha | 74.40 | 5 pelaku usaha | 663.5 | 5 pelaku usaha | 228 | 5 pelaku usaha | 166 | 5 pelaku usaha | 195 | 5 pelaku usaha | 195 | | | | |
| | | | | | Pembangunan dan operasional rumah kemasan dan pusat informasi produk | | | | | 1 unit | 50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah pelaksanaan rehab UPI | 1 unit | | 1 unit | 150 | | | 1 unit | 25 | 1 unit | 36 | 1 unit | 21 | | | | |
| | | | | | Jumlah pelaksanaan rehab pasar ikan | 1 unit | | 1 unit | 177.50 | | | 1 unit | 25 | 1 unit | 25 | 1 unit | 20 | | | | |
| | | | | | Terlaksananya sekolah lapang/study banding/magang | 1 kali | 1 kali | 30 | 1 kali | 40 | 1 kali | 20 | 1 kali | 11 | 1 kali | 40 | 1 kali | 40 | | | |
| | | | | | Penyediaan aplikasi data kelembagaan usaha perikanan | | | | | 1 aplikasi | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tersedianya sarana pengolahan | | | 5 klmpok | 40 | 5 klmpok | 20 | 5 klmpok | 20 | 5 klmpok | 20 | 5 klmpok | 20 | | | | |
| | | | | | Tersedianya sarana pemasaran (etalase, fish box, alat timbang & peralatan lainnya) | | | 5 klmpok | 40 | 5 klmpok | 20 | 5 klmpok | 20 | 5 klmpok | 20 | 5 klmpok | 20 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | | |
|--------|---------|------|---------------------------------|--|--|---|------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------|------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | | |
| | | | | | | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | | | Target | Rp (juta) | |
| 1 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | |
| | | | 2 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota | Jumlah penanganan kerawanan pangan daerah | 1 pekerjaan | | 2 pekerjaan | 155 | 2 pekerjaan | 175 | 2 pekerjaan | 195 | 2 pekerjaan | 215 | 2 pekerjaan | 235 | | | |
| | | | 2 | 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kab/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kab/kota (laporan) | | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | | | |
| | | | | | fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan bazar untuk menjaga stabilitas harga | | | 2 kali | 15 | 2 kali | 10 | 2 kali | 10 | 2 kali | 10 | 2 kali | 10 | | | |
| | | | | | Apresiasi ketahanan pangan | | | 12 kategori | 60 | 12 kategori | 60 | 12 kategori | 60 | 12 kategori | 60 | 12 kategori | 60 | | | |
| | | | | | Regulasi ketahanan pangan daerah | | | | | 2 dokumen | 5 | 2 dokumen | 5 | 2 dokumen | 5 | 2 dokumen | 5 | | | |
| | | | 2 | 2 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kab/kota (dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah pembinaan dan penumbuhan nagari mandiri pangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah pengadaan cadangan pangan | | | 3,2 ton | 40 | 4,8 ton | 60 | 6 ton | 75 | 6 ton | 75 | 7,6 ton | 95 | | | |
| | | | | | Terlaksananya sosialisasi, identifikasi, verifikasi, monitoring dan pembinaan nagari mandiri pangan | | | 40 orang | 12 | 40 orang | 12 | 40 orang | 12 | 40 orang | 12 | 40 orang | 12 | | | |
| | | | | | Pendistribusian tanaman pangan untuk daerah rawan pangan | | | 4 klmpok | 20 | 4 klmpok | 20 | 4 klmpok | 20 | 4 klmpok | 25 | 4 klmpok | 25 | | | |
| | | | | | Distribusi ternak untuk daerah rentan rawan pangan | | | 4 klmpok | 60 | 4 klmpok | 60 | 4 klmpok | 60 | 4 klmpok | 75 | 4 klmpok | 75 | | | |
| | | | | | | 77.7 | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | | |
| | | | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penurunan jumlah konsumsi beras (kg/kapita/th) | 118 | 114 | 818.02 | 113 | 1,096 | 112 | 1,205.60 | 111 | 1,325.56 | 110 | 1,458 | 108 | 1,603.38 | | |
| | | | 1 | 1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok atau pangan lainnya dalam stabilitas pasokan dan harga pangan | | | 3 Komoditi | 430 | 3 Komoditi | 468.60 | 3 Komoditi | 510.65 | 3 Komoditi | 563 | 3 Komoditi | 614 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|---------------------------------|---|--|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | |
| | | | | | | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | | | Target | Rp (juta) |
| 1 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| | | | 1 1 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Infomasi harga pangan dan neraca bahan makanan (laporan) | 12 laporan | | 12 laporan | | 12 laporan | | 12 laporan | | 12 laporan | | 12 laporan | | | |
| | | | | | Data harga pangan & neraca bahan makanan | | | 12 bulan | 25 | 12 bulan | 26.60 | 12 bulan | 27.5 | 12 bulan | 29 | 12 bulan | 30 | | |
| | | | | | Jumlah pengadaan running teks | | | 1 paket | 20 | 1 paket | 22 | 1 paket | 25 | 1 paket | 28 | 1 paket | 30 | | |
| | | | 1 2 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia (laporan) | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | | |
| | | | | | Distribusi bibit pangan & sayur-sayuran (jumlah pembibitan tanaman pangan & sayur-sayuran untuk kebutuhan pangan keluarga) | | | 12 jenis | 50 | 12 jenis | 52 | 12 jenis | 55 | 15 jenis | 63 | 15 jenis | 65 | | |
| | | | | | Jumlah pengadaan bibit tanaman buah-buahan untuk pekarangan masyarakat memenuhi kebutuhan keluarga | | | 6 jenis | 120 | 6 jenis | 145 | 6 jenis | 150 | 8 jenis | 175 | 8 jenis | 200 | | |
| | | | | | Jumlah pengadaan bibit ternak unggas/ikan untuk kelompok masyarakat | | | 1 paket | 10 | 1 paket | 13 | 1 paket | 15 | 1 paket | 15 | 1 paket | 15 | | |
| | | | 1 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya (laporan) | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | | |
| | | | | | Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok & pangan lainnya | | | 16 kcmtan | | 16 kcmtan | 10 | 16 kcmtan | 10 | 16 kcmtan | 10 | 16 kcmtan | 10 | | |
| | | | 1 4 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan (dokumen) | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | |
| | | | | | Pelaksanaan operasi pasar khusus | | | 1 kali | 70 | 1 kali | 70 | 1 kali | 75.56 | 1 kali | 77 | 1 kali | 80 | | |
| | | | | | Pelaksanaan bazar pangan | | | 2 kali | 20 | 2 kali | 20 | 2 kali | 25 | 2 kali | 25 | 2 kali | 30 | | |
| | | | 1 5 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan (unit) | 1 unit | | 1 unit | | 1 unit | | 1 unit | | 1 unit | | 1 unit | | | |
| | | | | | Jumlah lomba APN yang dilaksanakan | | | 7 kategori | 45 | 7 kategori | 54 | 7 kategori | 56 | 7 kategori | 62 | 7 kategori | 65 | | |
| | | | | | Jumlah pembinaan & pengembangan kelembagaan jaringan distribusi pangan | | | 12 kali | 25 | 16 kcmtn | 28 | 16 kcmtn | 30 | 16 kcmtn | 30 | 16 kcmtn | 34 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|---------------------------------|---|---|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | |
| | | | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | | | Target | Rp (Juta) |
| 1 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| | | | 1 6 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia yang dikembangkan (unit) | 1 unit | | 1 unit | | 1 unit | | 1 unit | | 1 unit | | | | | |
| | | | | | Jumlah TTI yang difasilitasi | | | 2 klmpok | 20 | 2 kcmtn | 25 | | |
| | | | 1 7 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga | 10 keluarga | 28 | 20 keluarga | 65 | 20 keluarga | 65 | 30 keluarga | 69 | 30 keluarga | 69 | 30 keluarga | 73 | | |
| | | | | | | 10 keluarga | 28 | 20 keluarga | 65 | 20 keluarga | 65 | 30 keluarga | 69 | 30 keluarga | 69 | 30 keluarga | 73 | | |
| | | | 2 | Pengelolaan dan Keselimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota | Jumlah cadangan pangan daerah | 8 ton | 110 ton | 12 ton | 169 | 17 ton | 179 | 22 ton | 184 | 25 ton | 201 | 25 ton | 209.38 | | |
| | | | 2 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kab/Kota | Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kab/Kota (laporan) | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | | |
| | | | | | Jumlah pelaksanaan kordinasi & sinkronisasi pengendalian cadangan pangan | | | 16 kcmtan | 10 | 16 kcmtan | 10 | | |
| | | | 2 2 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Rencana kebutuhan pangan lokal (dokumen) | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | |
| | | | | | Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal | | | 16 kcmtan | 10 | 16 kcmtan | 10 | | |
| | | | 2 3 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (ton) | 3 ton | | 12 ton | | 5 ton | | 5 ton | | 7 ton | | | | | |
| | | | | | Jumlah pengadaan cadangan pangan daerah terutama beras (kerjasama dengan BULOG) | | | 12 ton | 145 | 5 ton | 150 | 5 ton | 155 | 7 ton | 162 | 5 ton | 170.38 | | |
| | | | | | Jumlah rapat koordinasi & sinkronisasi | | | 4 kali | 4 | 4 kali | 4 | | |
| | | | 2 4 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (ton) | 3 ton | | 12 ton | | 5 ton | | 5 ton | | 7 ton | | 5 ton | | | |
| | | | | | Jumlah penyediaan cadangan pangan | | | 1 paket | | 1 paket | 15 | 1 paket | 15 | 1 paket | 15 | 1 paket | 15 | | |
| | | | 3 | Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi | Tersedianya harga minimum pangan daerah | 1 dokumen | | 1 dokumen | 20 | 1 dokumen | 23 | 1 dokumen | 25 | 1 dokumen | 28 | 1 dokumen | 30 | | |
| | | | 3 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harag minimum pangan pokok lokal (laporan) | 1 laporan | | 1 laporan | 20 | 1 laporan | 25 | 1 laporan | 26 | 1 laporan | 28 | 1 laporan | 30 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|---------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|-----------|-----------|----------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | |
| | | | | | | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | | | Target | Rp (juta) |
| 1 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| | | | 4 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Angka Kecukupan Energi dan Angka Kecukupan Protein | 2100 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari | 2100 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari | 477 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari | 2100 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari | 550 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari | 614 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari | 666 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari | 750 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari | | | | | | |
| | | | 4 | 1 Penyesuaian dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Target konsumsi pangan perkapita pertahun (dokumen) | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | | | |
| | | | | | Jumlah buku PPH yang dibuat | | 7 buku | 7 buku | 7 buku | 7 buku | 7 buku | 7 buku | 7 buku | 7 | | | | | |
| | | | | | Jumlah peserta sosialisasi PPH | | 35 orang | 35 orang | 40 orang | 35 orang | 45 orang | 35 orang | 45 orang | 48 | | | | | |
| | | | 4 | 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (laporan) | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | | | | | | |
| | | | | | Jumlah pemberdayaan KWT melalui P2L | | 2 KWT | 170 KWT | 2 KWT | 170 KWT | 4 KWT | 207 KWT | 4 KWT | 235 KWT | 4 KWT | 260 KWT | | | |
| | | | | | Diversifikasi olahan pangan non beras dan non terigu (jumlah festival pangan lokal B2SA tk.kab dan provinsi) | | 2 kali | 97 kali | 2 kali | 100 kali | 2 kali | 100 kali | 2 kali | 100 kali | 2 kali | 100 kali | | | |
| | | | | | Sosialisasi B2SA (jumlah penyebaran informasi B2SA melalui media masa) | | 3 jenis | 14 jenis | 2 jenis | 20 jenis | 2 jenis | 25 jenis | 2 jenis | 30 jenis | 2 jenis | 35 jenis | | | |
| | | | | | Pembuatan percontohan pemanfaatan pemanfaatan pekarangan | | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 30 paket | 1 paket | 35 paket | 1 paket | 40 paket | 1 paket | 50 paket | | | |
| | | | | | Jumlah pameran hari pangan sedunia tk.provinsi dan nasional yang diikuti | | 2 kali | 35 kali | 2 kali | 37 kali | 2 kali | 40 kali | 2 kali | 44 kali | 2 kali | 50 kali | | | |
| | | | | | Jumlah pelatihan pengolahan pangan lokal | | 40 org | 96 org | 60 org | 118 org | 60 org | 120 org | 60 org | 125 org | 60 org | 150 org | | | |
| | | | 4 | 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun (laporan) | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | | | | | | |
| | | | | | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun | | 16 kcmtan | 15 kcmtan | 16 kcmtan | 19 kcmtan | 16 kcmtan | 25 kcmtan | 16 kcmtan | 26 kcmtan | 16 kcmtan | 30 kcmtan | | | |
| | | | | | Terlaksananya studi banding dalam rangka diversifikasi pangan | | 30 org | 8 org | 30 org | 9 org | 30 org | 10 org | 30 org | 15 org | 30 org | 20 org | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|---|--|--|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | |
| | | | | | | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | | | Target | Rp (juta) |
| 1 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Meningkatnya keamanan pangan segar (%) | 20 | 20% | 15 | 30% | 395 | 35% | 434 | 40% | 478 | 45% | 495 | 50% | 525 | | |
| | | | 1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota | Jumlah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar | | 10 kelompok | 15 kelompok | 395 | 20 kelompok | 435 | 25 kelompok | 478 | 30 kelompok | 495 | 35 kelompok | 525 | | | |
| | | | 1 1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota | Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota yang dibina (dokumen) | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | Pembentukan Tim Satgas Keamanan Pangan Terpadu | | | 18 orang | 40 | 18 orang | 41.5 | 18 orang | 41.5 | 18 orang | 42.5 | 18 orang | 46.5 | | | |
| | | | | Jumlah pengawasan keamanan pangan terpadu yang dilaksanakan | | | 2 Kali | 40 | 2 Kali | 41.5 | 2 Kali | 41.5 | 2 Kali | 42.5 | 2 Kali | 46.5 | | | |
| | | | 1 2 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota | Jumlah sertifikat keamanan pangan segar asal tumbuhan (sertifikat) | 5 sertifikat | | 5 sertifikat | | 5 sertifikat | | 5 sertifikat | | 5 sertifikat | | 5 sertifikat | | | | |
| | | | | Terlaksananya sertifikasi pangan segar asal tumbuhan | | | 10 sertifikat | 10 | 10 sertifikat | 15 | | | |
| | | | | Terlaksananya sosialisasi | | | 35 orang | 25 | 35 orang | 28 | 35 orang | 30 | 35 orang | 30 | 35 orang | 35 | | | |
| | | | 1 3 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota | Jumlah registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota (dokumen) | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | Jumlah peserta sosialisasi | | | 35 orang | 25 | 35 orang | 30 | | | |
| | | | | Jumlah registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | 5 org | 10 | 5 org | 15 | 5 org | 15 | 5 org | 15 | 5 org | 20 | | | |
| | | | 1 4 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota | Jumlah rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota (dokumen) | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | Sosialisasi dan pengujian sampel penggunaan bahan berbahaya (jumlah uji sampel pangan segar asal tumbuhan) | | | 15 sampel | 50 | 17 sampel | 53 | 20 sampel | 53 | 22 sampel | 53 | 25 sampel | 55 | | | |
| | | | | Jumlah penyebaran informasi keamanan pangan melalui pembuatan spanduk/balho/benner/leaflet | | | 4 jenis | 15 | 4 jenis | 20 | 4 jenis | 20 | 4 jenis | 20 | 4 jenis | 25 | | | |
| | | | | Jumlah penyebaran informasi keamanan pangan melalui pembuatan video tron | | | 1 unit | 130 | 1 unit | 140 | 1 unit | 142 | 1 unit | 150 | 1 unit | 179 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|---|------------------------------|------|---------------------------------|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | |
| | | | | | | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | Target | Rp (juta) | | | Target | Rp (juta) |
| 1 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| | | | 1 5 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota | Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota (dokumen) | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | Pembelian alat rapid test untuk uji mutu dan keamanan pangan | | | 10 paket | 15 | 15 paket | 18 | 15 paket | 20 | 15 paket | 20 | 15 paket | 25 | | | |
| | | | | Tersedianya tempat penyimpanan untuk uji sampel pengujian mtu | | | 1 unit | 25 | 1 unit | 27 | 1 unit | 27 | 1 unit | 27 | 1 unit | 35 | | | |
| Meningkatnya nilai RB berdasarkan PMPRB | Meningkatnya tata kelola OPD | | | Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB | | 75 | 75 | 76 | | 76.5 | | 77 | | 77.5 | | | | | |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN | 79% | 80% | 3,626.78 | 82% | 3,628.03 | 85% | 3,629.78 | 88% | 3,632.03 | 90% | 3,634.78 | 95% | 3,638.03 | |
| | | | 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 1 tahun | 2,747 | 1 tahun | 2,747 | 1 tahun | 2,777 | 1 tahun | 2,785 | 1 tahun | 2,798 | 1 tahun | 2,804 | | |
| | | | 1 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (org/bulan) | | 2,626.78 | | 2,627.03 | | 2,658.78 | | 2,701.03 | | 2,707.78 | | 2,713.79 | | |
| | | | | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan PNS | | 14 bulan | | 14 bulan | | 14 bulan | | 14 bulan | | 14 bulan | | 14 bulan | | | |
| | | | | Terlaksananya pembayaran penghasilan | | 10 bulan | | 10 bulan | | 10 bulan | | 10 bulan | | 10 bulan | | 10 bulan | | | |
| | | | 1 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen) | | 120 | | 120 | | 118 | | 84 | | 90 | | 90 | | |
| | | | | Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan | | vg | | 10 bulan | | | |
| | | | | Terlaksananya pembayaran BPJS Kesehatan PTT & | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | | |
| | | | | Terlaksananya pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PTT | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | | |
| | | | | Terlaksananya pembayaran honor PTT & Kontrak untuk 4 org | | 14 bulan | | 14 bulan | | 14 bulan | | 14 bulan | | 14 bulan | | 14 bulan | | | |
| | | | 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 12 bulan | 410 | 12 bulan | 411 | 12 bulan | 382 | 12 bulan | 392 | 12 bulan | 366 | 12 bulan | 376 | | |
| | | | 2 1 | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket) | | 40 | | 40 | | 10 | | 10 | | 8 | | 8.24 | | |
| | | | | Terlaksananya pembelian alat listrik dan elektronik | | | | 30 buah | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator-indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan sasaran RPJMD dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas. Program prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mendukung misi ke-2 dan ke-4 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026 disajikan pada tabel 7.2. berikut ini



Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Sasaran RPJM | Indikator Sasaran Renstra | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|---|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah | Persentase ketersediaan pangan daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase penanganan kerawanan pangan daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Skor PPH (%) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
| | | Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB | 75 | 75 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 77,5 |
| 2 | Mengembangkan potensi kawasan perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan | Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap | 1,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| | | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 7 | 9 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| | | Persentase peningkatan produksi olahan perikanan | 1,41 | 1,53 | 1,23 | 1,36 | 1,34 | 1,32 | 1,32 |



Tabel 7.1 Cascading RPJMD dan Renstra Daerah

Matrik Keterkaitan Rancangan Awal RPJMD 2021 - 2026 Dengan Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan 2021 - 2026

| RANWAL RPJMD 2021 -2026 | | | | | | | RANWAL RENSTRA OPD | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|
| NO | Visi | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM (Permendagri 90/2019) | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| 1 | Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani | Membangun Masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter | Terwujudnya sumberdaya manusia yang mandiri dan berdaya saing | Indeks ketahanan pangan daerah | Meningkatnya ketahanan pangan daerah | Indeks ketahanan pangan daerah | Meningkatnya ketahanan pangan daerah | Indeks ketahanan pangan daerah | Meningkatnya Ketersediaan Pangan | Persentase Ketersediaan Pangan Daerah | Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Penyediaan Infrastruktur & Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah kab/kota | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan |
| | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur |
| | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya |
| | | | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik |
| | | | | | | | | | | | | | Penyusunan Rencana & Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan |
| | | | | | | | | | Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan | Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Daerah | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan |
| | | | | | | | | | | | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kab/kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan kab/kota |

| RANWAL RPJMD 2021 -2026 | | | | | | | RANWAL RENSTRA OPD | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|--------|------------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| NO | Visi | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM (Permendagri 90/2019) | Kegiatan | Sub Kegiatan | |
| | | | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Pengadaan, pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah kab/kota | |
| | | | | | | | | | Meningkatnya Diversifikasi Pangan | Skor pola pangan harapan (PPH) | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan | Penyediaan Informasi Harga Pangan & Neraca Bahan Makanan | |
| | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | |
| | | | | | | | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi & Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok & Pangan Lainnya | |
| | | | | | | | | | | | | | Pemantauan Stok, Pasokan & Harga Pangan | |
| | | | | | | | | | | | | | Pengembangan Kelembagaan & Jaringan Distribusi Pangan | |
| | | | | | | | | | | | | | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat & Toko Tani Indonesia | |
| | | | | | | | | | | | | Pengeolaan & Keseimbangan Cadangan Pangan kab/kota | Koordinasi & Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kab/kota | |
| | | | | | | | | | | | | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | |
| | | | | | | | | | | | | | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/kota | |
| | | | | | | | | | | | | | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah kab/kota | |
| | | | | | | | | | | | | Penentuan Harga Minimum Daerah unyuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat & Pemerintah Provinsi | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | |
| | | | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per |

| RANWAL RPJMD 2021 -2026 | | | | | | | RANWAL RENSTRA OPD | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| NO | Visi | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM (Permendagri 90/2019) | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | | | | | | | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya |
| | | | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan & Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun |
| | | | | | | | | | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/kota | Pengutatan Kelembagaan Keamanan Segar Daerah kab/kota |
| | | | | | | | | | | | | | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah kab/kota |
| | | | | | | | | | | | | | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota |
| | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah kab/kota |
| | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Sarana & Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah kab/kota |
| 2 | Mewujudkan kabupaten agam maju, masyarakat sejahtera, menuju agam mandiri, berprestasi yang madani | Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata | Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat | Laju pertumbuhan PRDB perkapita | Mengembangkan Potensi Kawasan Perikanan Tangkap dan Budidaya secara Berkelanjutan | Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK) | Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan | Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil |
| | | | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan & Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil |
| | | | | | | | | | | | | Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Penyediaan Data & Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/kota |
| | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/kota |
| | | | | | | | | | | | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/kota |

| RANWAL RPJMD 2021 -2026 | | | | | | | RANWAL RENSTRA OPD | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|--------|------------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|--|
| NO | Visi | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM (Permendagri 90/2019) | Kegiatan | Sub Kegiatan | |
| | | | | | | | | | | | | | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah kab/kota | |
| | | | | | | | | | | | | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | |
| | | | | | | | | | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa & Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah kab/kota | Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan | |
| | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | |
| | | | | | | | | | | | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | |
| | | | | | | | | | | | | | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kab/kota | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil |
| | | | | | | | | | | | | | Pelaksanaan fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | |
| | | | | | | | | | | | | | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) |

| RANWAL RPJMD 2021 -2026 | | | | | | | RANWAL RENSTRA OPD | | | | | | |
|-------------------------|------|------|--------|------------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|--|--|--|--|---|
| NO | Visi | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM (Permendagri 90/2019) | Kegiatan | Sub Kegiatan |
| | | | | | | | | | | | | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkutan Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT |
| | | | | | | | | | Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan | Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Penyediaan Data & Informasi Usaha Pemasaran & Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah kab/kota |
| | | | | | | | | | | | | Pembinaan Mutu & Keamanan Hasil Perikanan | Pelaksanaan Bimbingan & Penerapan Persyaratan/Standar pada Usaha Pengolahan & Pemasaran Skala Mikro & Kecil |
| | | | | | | | | | | | | Penyediaan & Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kab/kota | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi & Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah kab/kota |
| | | | | | | | | | | | | | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro & Kecil dalam 1 (satu) daerah kab/kota |

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepala Daerah kedalam proses implementasi program dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026 serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2020 - 2024 , Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024, Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Pangan 2021 – 2026, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Strategis ini akan menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan/pedoman bagi seluruh bidang di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan peran dalam pelayanan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian dan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Strategis setiap tahunnya, sehingga Visi “Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani”.

Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur Dinas dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi. Dengan adanya Renstra ini diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama



dan koordinasi serta tanggungjawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian pembangunan sektor pangan dan sektor perikanan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam tergantung pada faktor-faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat, sektor swasta dan lembaga pemerintah lain dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Lubuk Basung, Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Agam

ROSWA DESWIRA, S.Pi.M.Si

NIP. 197212092006042007



VISI

Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani

MISI 4

Membangun Masyarakat yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkualitas dan Berkarakter

TUJUAN 2

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing

Indikator

Indeks Ketahanan Pangan Daerah

SASARAN 2

Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Indikator

Indeks Ketahanan Pangan Daerah

TUJUAN RENSTRA

Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Indikator

Indeks Ketahanan Pangan Daerah

SASARAN 1

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah
2. Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan
3. Meningkatnya Diversifikasi Pangan

INDIKATOR

1. Persentase Ketersediaan Pangan Daerah
2. Persentase Penanganan Kerawanan Pangan
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

SASARAN 2

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

INDIKATOR

Nilai RB Perangkat Daerah berdasarkan PMPRB

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator

Peningkatan Jumlah Nagari Mandiri Pangan

Indikator

Persentase Penurunan Nagari Rawan Pangan

Indikator

Penurunan Jumlah Konsumsi Beras (kg/perkapita/tahun)

Indikator

Meningkatnya Keamanan Pangan Segar (%)

Indikator

Nilai RB Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota

Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Ketersediaan Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi BMD pada Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator
Jumlah lumbung pangan yang tersedia

Indikator
Terlaksananya penyusunan peta kerentanan pangan

Indikator
Jumlah penanganan kerawanan pangan daerah

Indikator
Tersedia dan tersalurkan pangan pokok atau pangan lainnya dalam stabilitas pasokan dan harga pangan

Indikator
Jumlah cadangan pangan daerah

Indikator
Tersedianya harga minimum pangan daerah

Indikator
Angka kecukupan energi dan angka kecukupan protein

Indikator
Jumlah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar

VISI
Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani

MISI 2
Membangun Perekonomian Masyarakat yang Kokoh Melalui Optimalisasi Sumber Daya Daerah dan Pengembangan Pariwisata

TUJUAN I
Meningkatnya Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat

Indikator
 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita

SASARAN 1
 Mengembangkan Potensi Kawasan Perikanan Tangkap dan Budidaya secara berkelanjutannya

Indikator
 Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian (ADHK)

TUJUAN RENSTRA
 Meningkatkan Produksi Usaha Perikanan

Indikator
 Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

- SASARAN 1**
1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap
 2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya
 3. Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan

INDIKATOR

1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)
2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)
3. Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan (%)

| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | | | | Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |
|--|---|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| Indikator | | | Indikator | | | | Indikator | | | Indikator |
| Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | | | Jumlah Produksi Ikan Tangkap (Ton) | | | | Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasar Ikan (orang) | | | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan terhadap Peraturan |
| Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) daerah kab/kota | Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Kegiatan Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, & genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kab/kota | Kegiatan Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kab/kota | Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah kab/kota | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Kegiatan Peminaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam kab/kota |
| Indikator | Indikator | Indikator | Indikator | Indikator | Indikator | Indikator | Indikator | Indikator | Indikator | Indikator |
| Jumlah unit usaha budidaya yang memiliki izin usaha/tanda daftar | Meningkatnya produktivitas rata-rata pembudidaya ikan (ton/orang/tahun) | Meningkatnya jumlah pembudidaya ikan yang terfasilitasi/terlayani sarana prasarana penunjang kawasan budidaya (pembudidaya) | Jumlah nelayan kecil yang terfasilitasi sarana kenelayanannya | Jumlah nelayan kecil yang terfasilitasi sarana kenelayanannya | Jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) yang tersedia | Jumlah kapal perikanan yang terdaftar | Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran yang terdaftar | Jumlah unit usaha yang memenuhi standar keamanan pangan | Jumlah ikan yang dipasarkan dalam daerah | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan terhadap Peraturan |

**RUMUSAN DEFINISI INDIKATOR PROGRAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

| NO | DEFINISI INDIKATOR PROGRAM | RUMUSAN |
|----|--|--|
| 1 | Laju pertumbuhan PDRB Lapangan usaha pertanian (ADHK) | $\frac{\text{PDRB}(n) - \text{PDRB}(n-1)}{\text{PDRB}(n-1)} \times 100\%$ Dimana: n = tahun pengamatan PDRB n-1 = tahun pengamatan PDRB sebelumnya |
| 2 | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%) | $\frac{\text{Produksi Tangkap}(n) - \text{Produksi Tangkap Tahun}(n-1)}{\text{Produksi Tangkap Tahun}(n-1)} \times 100\%$ n = tahun pengamatan n-1 = tahun pengamatan sebelumnya |
| a | Jumlah Produksi Ikan Tangkap (Ton) | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang dihasilkan dalam 1 Tahun |
| b | Jumlah Nelayan Kecil yang Terfasilitasi Sarana Kenelayanan (Nelayan) | Jumlah Nelayan yang dibantu Sarana dan Prasarana Penangkapan dalam 1 Tahun |
| c | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan(TPI) yang Tersedia (Unit) | Jumlah TPI yang dibangun/ di rehab |
| d | Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar (TDP) | Jumlah Kapal Perikanan yang terdaftar selama 1 Tahun |
| 3 | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%) | $\frac{\text{Produksi Budidaya Tahun} - \text{Produksi Budidaya Tahun}(n-1)}{\text{Produksi Budidaya Tahun}(n-1)} \times 100\%$ n = tahun pengamatan n-1 = tahun pengamatan sebelumnya |
| a | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang dihasilkan dalam 1 Tahun |
| b | Jumlah Unit Usaha Budidaya yang Memiliki Izin Usaha/Tanda Daftar (unit usaha) | Jumlah Unit Usaha Budidaya yang memiliki Izin dalam 1 Tahun |
| c | Produktivitas rata-rata Pembudidaya Ikan (Ton/Orang/Tahun) | Jumlah produksi/jumlah pembudidaya/tahun |
| d | Jumlah Pembudidayaan Ikan yang Terfasilitasi/Terlayani Sarana Penunjang Kawasan Budidaya (Pembudidaya) | Jumlah Pembudidaya Ikan yang dibantu sarana Penunjang Budidaya |
| 4 | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%) | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%) Pada Tahun Berjalan (Tahun n) = Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan (unit) Pada Tahun Berjalan (Tahun n) : Jumlah Pelaku Usaha Yang Diperiksa (unit) Pada Tahun Berjalan (Tahun n) x 100% |
| 5 | Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan (%) | $\frac{\text{Produksi Olahan Perikanan Tahun}(n) - \text{Produksi Olahan Perikanan Tahun}(n-1)}{\text{Produksi Olahan Perikanan Tahun}(n-1)} \times 100\%$ n = tahun pengamatan n-1 = tahun pengamatan sebelumnya |
| a | Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasar Ikan (orang) | Jumlah pelaku pengolahan dan pemasar ikan (cacah lengkap) di Kabupaten Agam |
| b | Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang Terdaftar | Jumlah usaha pengolahan dan pemasar ikan yang terdaftar Tahun berjalan (NIB) |
| c | Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standar Keamanan Pangan | Jumlah usaha yang mendapatkan Sertifikat Standar Keamanan pangan tahun berjalan (PIRT/Halal/GMP) unit produksi |

**RUMUSAN DEFINISI INDIKATOR PROGRAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

| No | Definisi Indikator Program | Rumusan |
|----|---|--|
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan. |
| 2 | Skor PPH | Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan |
| 3 | Persentase Ketersediaan Pangan Daerah | $\frac{\text{Jumlah produksi beras}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ |
| 4 | Persentase Penanganan Kerawanan Pangan | $\frac{\text{Jumlah penanganan kerawanan pangan yg dilaksanakan}}{\text{Jumlah penanganan kerawanan pangan yg direncanakan}} \times 100\%$ |
| 5 | Peningkatan Jumlah Nagari Mandiri Pangan | Jumlah nagari mandiri pangan pada tahun sebelumnya + nagari mandiri pangan pada tahun berjalan |
| a | Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia | Jumlah lumbung pangan pada tahun sebelumnya + lumbung pangan pada tahun berjalan |
| 6 | Jumlah Konsumsi Beras (Kg/kapita/tahun) | Jumlah konsumsi beras satu wilayah selama 1 tahun / jumlah penduduk |
| a | Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam kegiatan pasar murah, bazar kepada masyarakat. |
| b | Jumlah Cadangan Pangan Daerah | Jumlah cadangan pangan pada tahun sebelumnya + jumlah cadangan pangan pada tahun berjalan |
| c | Tersedianya Harga Minimum Pangan Daerah (Dokumen) | Dokumen pada tahun berjalan |
| 7 | Persentase Penurunan Nagari Rawan Pangan | Jumlah nagari rawan pangan tahun sebelumnya - jumlah nagari rawan pangan pada tahun berjalan |
| a | Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan Pangan (Pekerjaan) | Penyusunan Peta Kerentanan Pangan kabupaten Agam |
| b | Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan (Pekerjaan) | Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan yang dilaksanakan pada tahun berjalan |
| 8 | Meningkatnya Keamanan Pangan Segar (%) | $\frac{\text{Jumlah Pangan Segar yang Aman}}{\text{Jumlah Pangan Segar yang Diuji}} \times 100\%$ |
| a | Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar (Kelompok) | Jumlah kelompok yang di bina pada tahun (n) |